



PT. LARAS SEMBADA

Architecture - Engineering and Management Consultant



Dokumen Kualifikasi

MK Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Bertindak untuk dan atas nama : **PT. LARAS SEMBADA**
Alamat : [REDACTED]
Telepon / fax : [REDACTED]
Email : [REDACTED]

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam;
- Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi;
- Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Tidak masuk dalam Daftar Hitam.
- Tidak akan menuntut jika pelelangan pengadaan barang/Jasa dibatalkan.

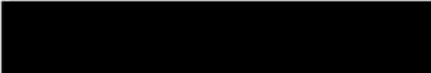
Demikian pernyataan ini di buat dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

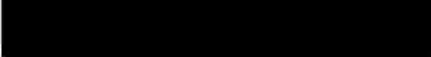
[REDACTED]
PT. LARAS SEMBADA



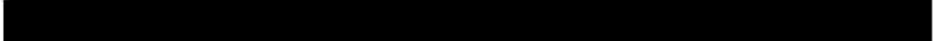
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

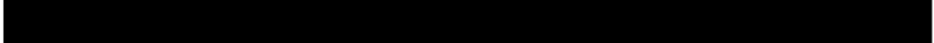
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

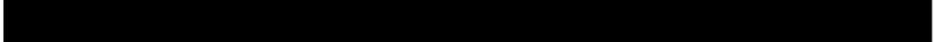
Nama : 

Jabatan : 

Bertindak Untuk dan atas nama : **PT. LARAS SEMBADA**

Alamat : 

Telepon/Fax : 

Email : 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. saya secara hukum untuk dan atas nama perusahaan **PT. LARAS SEMBADA** berdasarkan surat akta pendirian dan akta perubahan terakhir **PT. LARAS SEMBADA**, 

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD [bagi pegawai K/L/PD, yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan Usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. Data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1.	Nama Perusahaan	:	PT. LARAS SEMBADA
2.	Status Perusahaan	:	
3.	Alamat Perusahaan	:	
	No. Telepon	:	
	No. Fax	:	
	E-Mail	:	
4.	Alamat Kantor Pusat	:	
	No. Telepon	:	
	No. Fax	:	
	E-Mail	:	

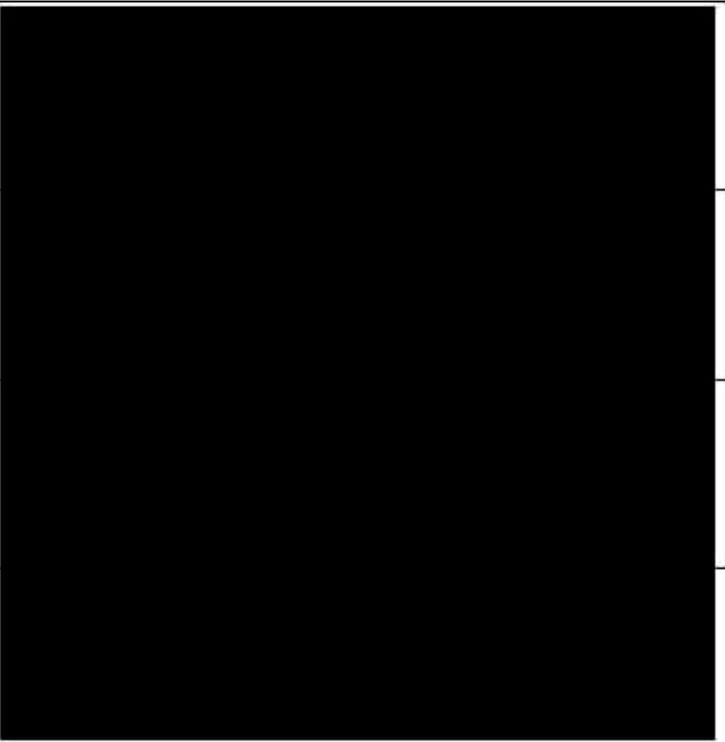
B. Perizinan Berusaha

1.	Nomor Induk Berusaha	:	
2.	Sertifikat Standar	:	
3.	Instansi Penerbit	:	

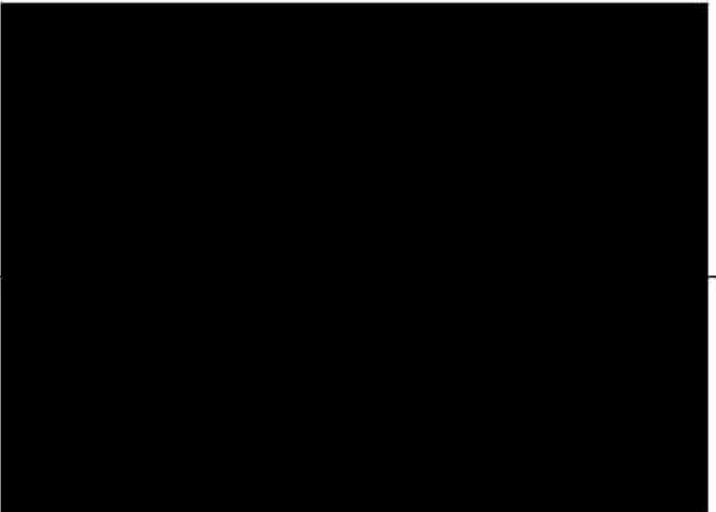
C. Sertifikat Badan Usaha Konstruksi

1.	Sertifikat Badan Usaha	:	
2.	Masa Berlaku Izin Usaha	:	
3.	Instansi Penerbit	:	
4.	Kualifikasi	:	
5.	Klasifikasi	:	
6.	Subklasifikasi	:	

D. Sertifikat Lainnya

1. Sertifikat Kartu Tanda Anggota INKINDO	:	
2. Masa Berlaku	:	
3. Instansi Penerbit	:	
1. Sertifikat ISO 9001:2015	:	
2. Masa Berlaku	:	
3. Instansi Penerbit	:	
1. Sertifikat ISO 14001:2015	:	
2. Masa Berlaku Izin Usaha	:	
3. Instansi Penerbit	:	
1. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan	:	
2. Masa Berlaku Izin Usaha	:	
3. Instansi Penerbit	:	

E. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian PT. Laras Sembada	
a. Nomor Akta	
b. Tanggal	
c. Nomor Notaris	
d. Nomor Pengesahan	
Kementerian Hukum dan HAM	
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akta	
b. Tanggal	
c. Nomor Notaris	
d. Nomor Pengesahan	
Kementerian Hukum dan HAM	

F. Pengelola Badan Usaha**1. Komisaris/Pengawas untuk Perseroan Terbatas (PT)**

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha

G. Data Keuangan**1. Susunan Kepemilikan Saham PT. LARAS SEMBADA.**

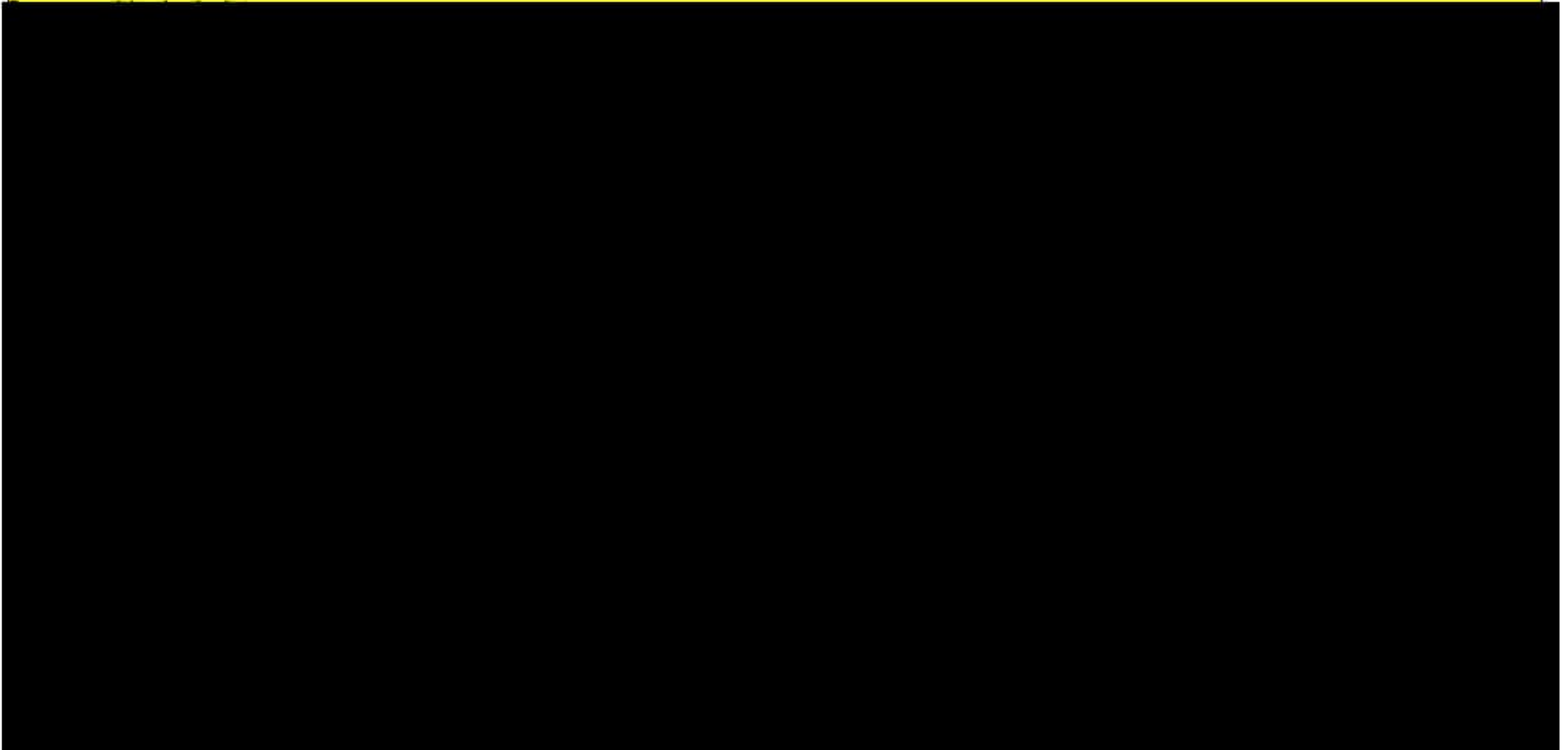
No	Nama	No. KTP	Alamat	Persen tase

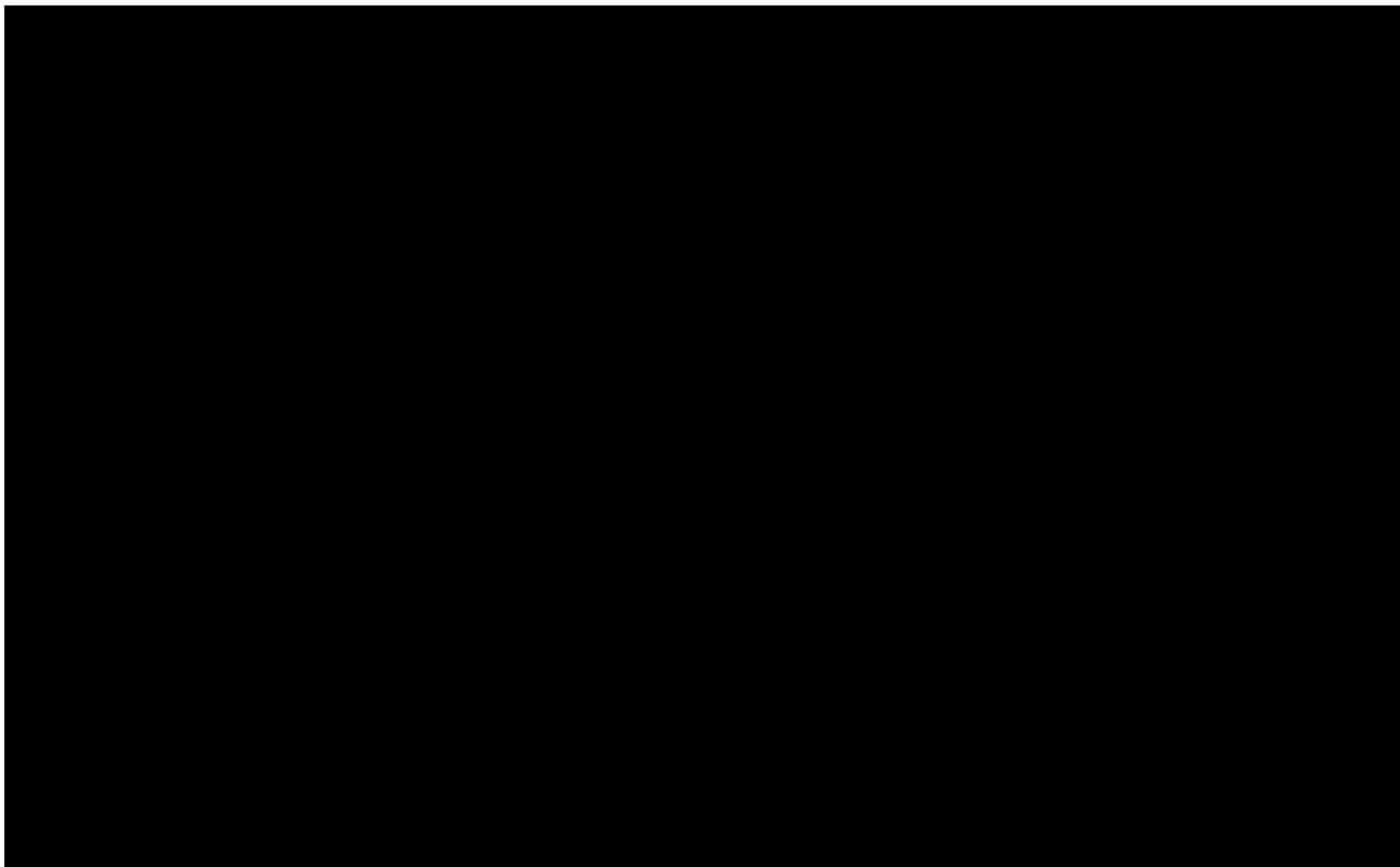
2. Pajak

--	--	--

H. Data Pengalaman Perusahaan 4 Tahun

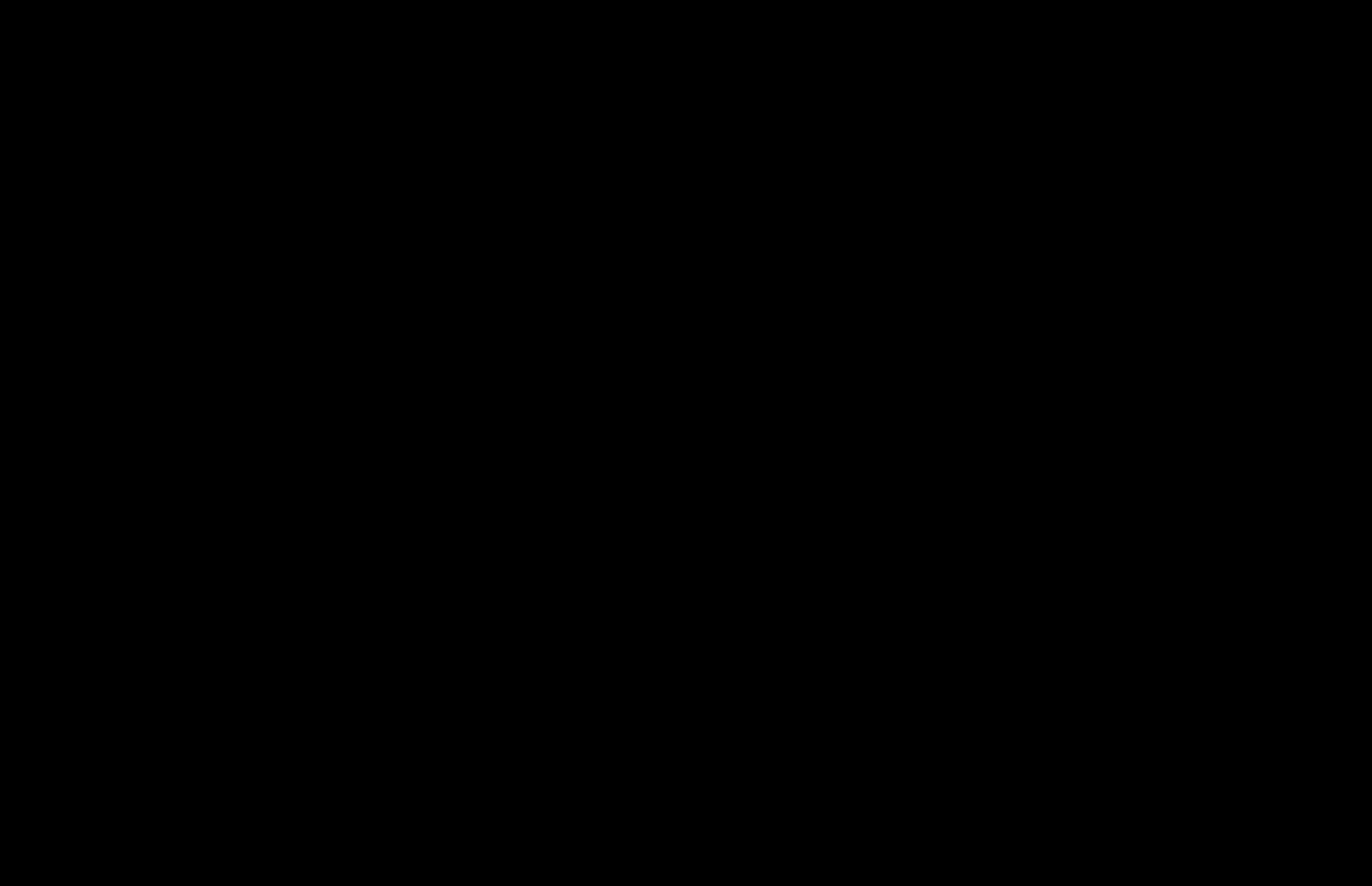
No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat / Telepon	No./ Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



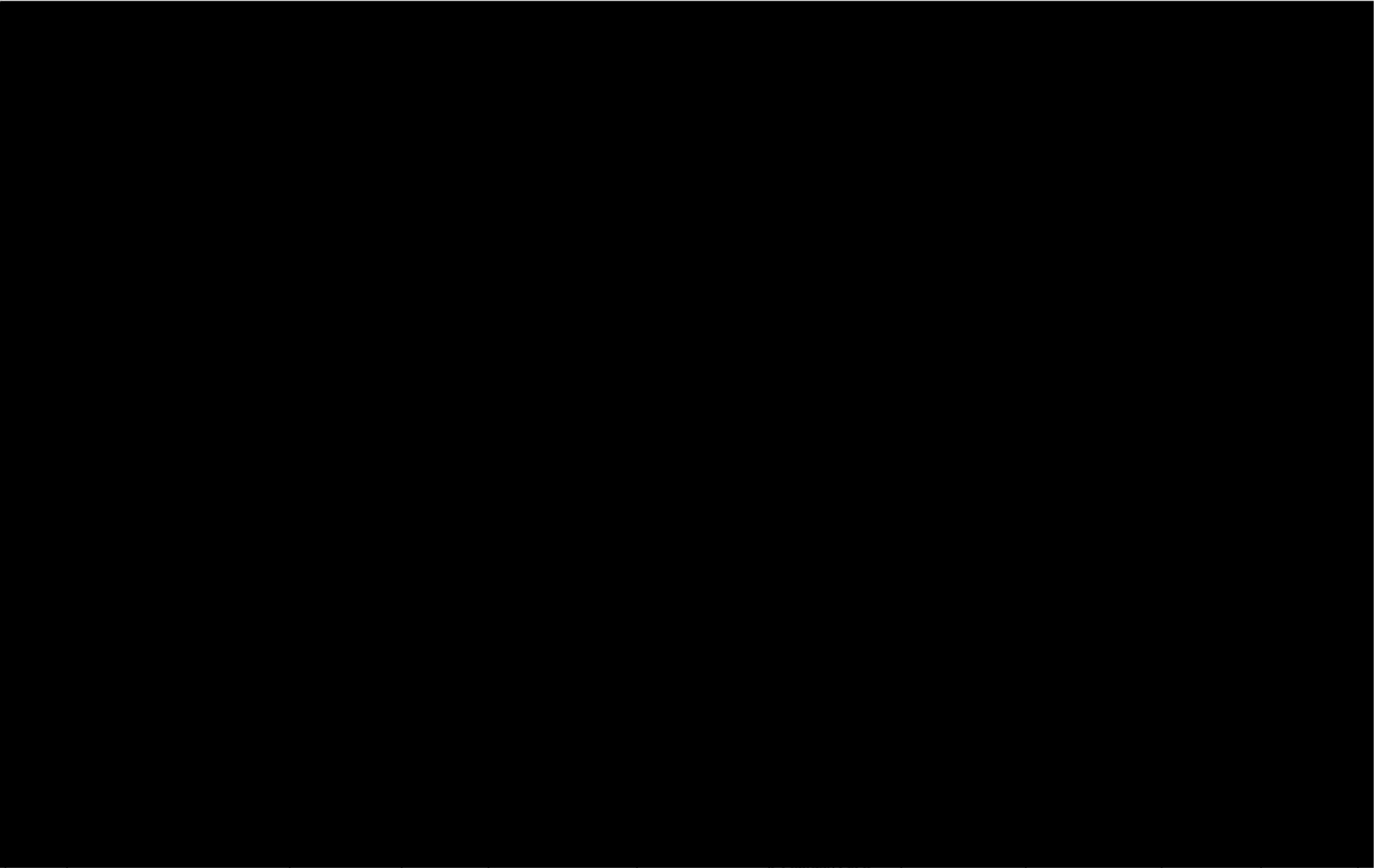






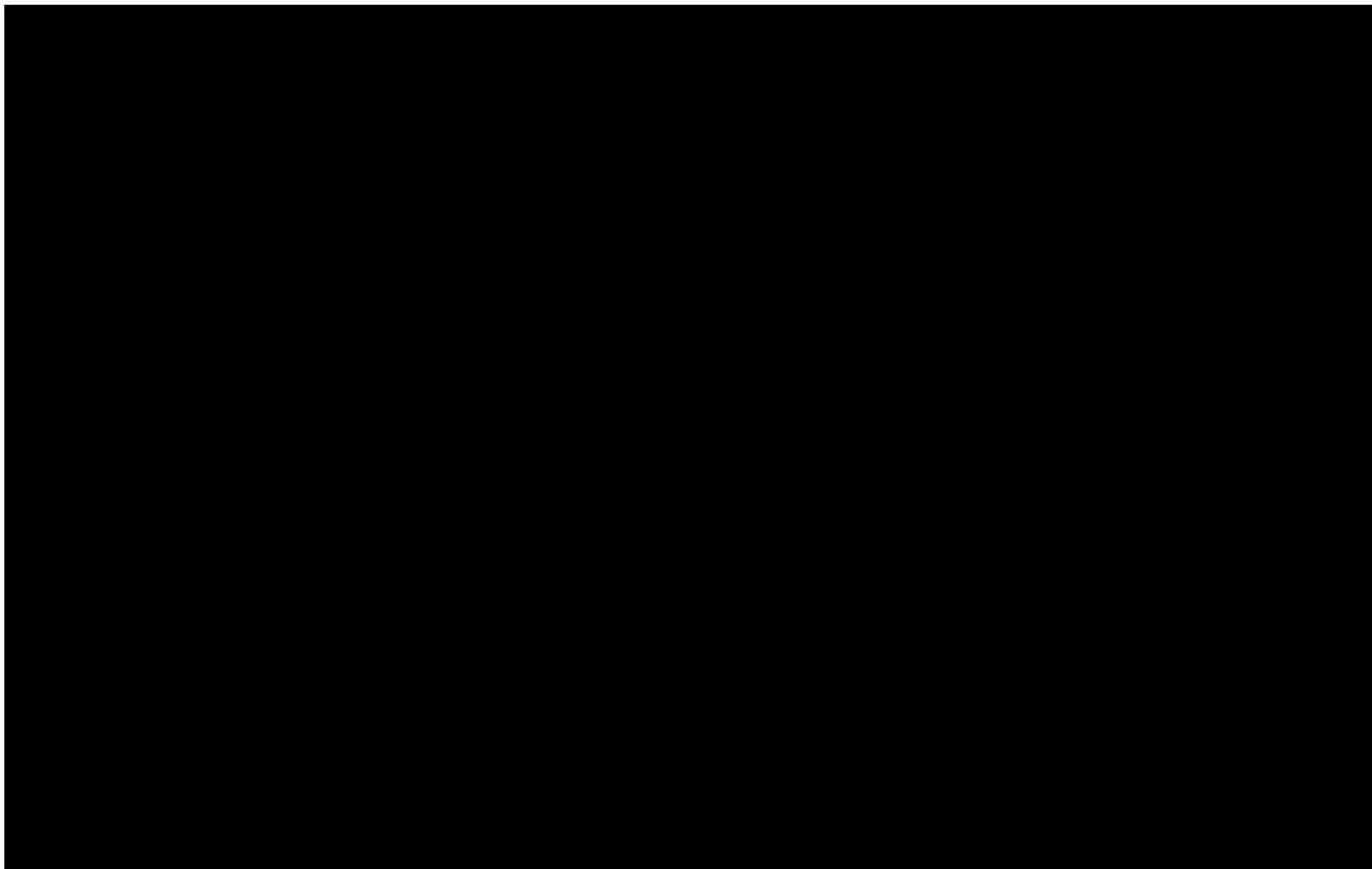


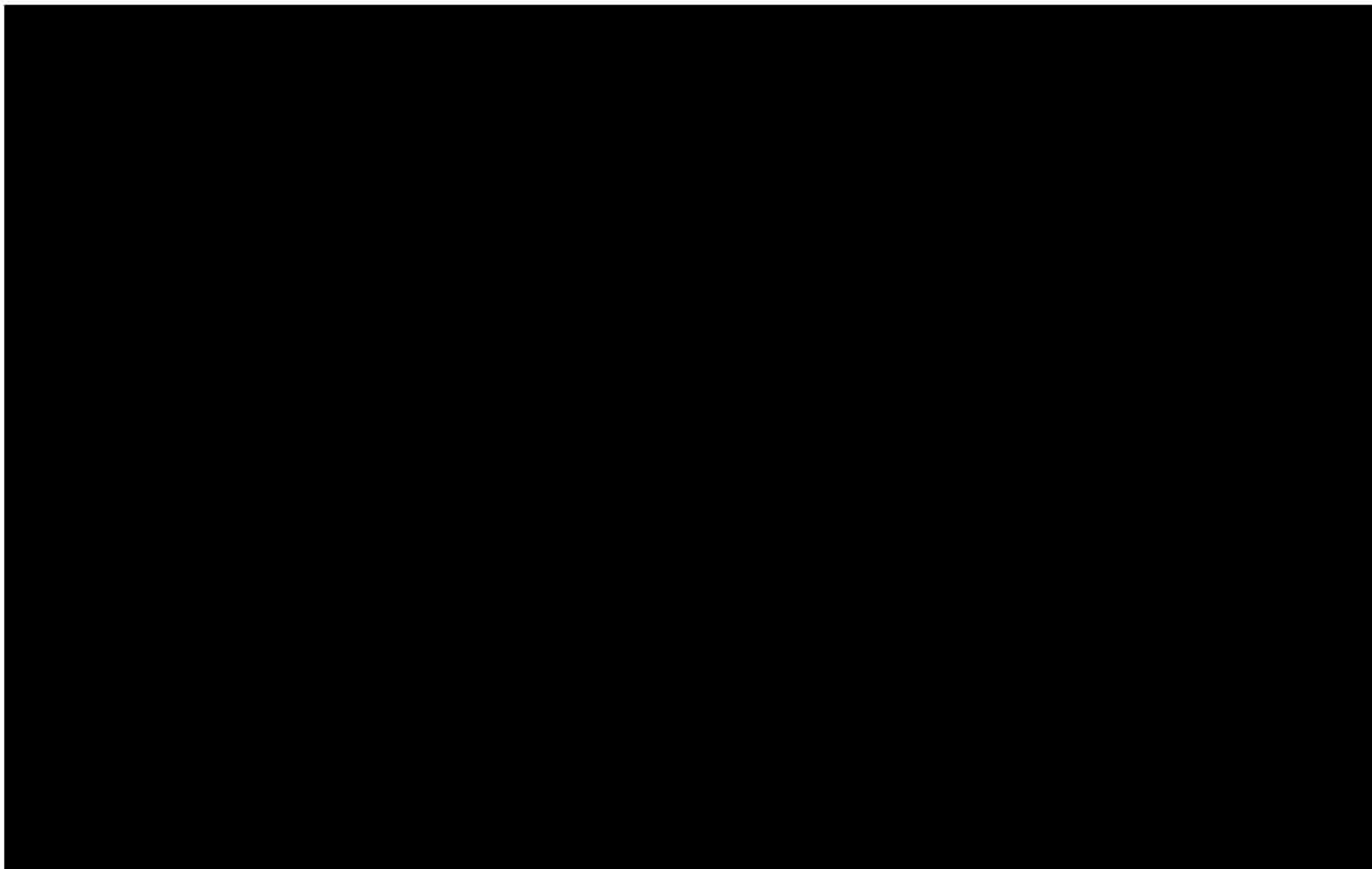














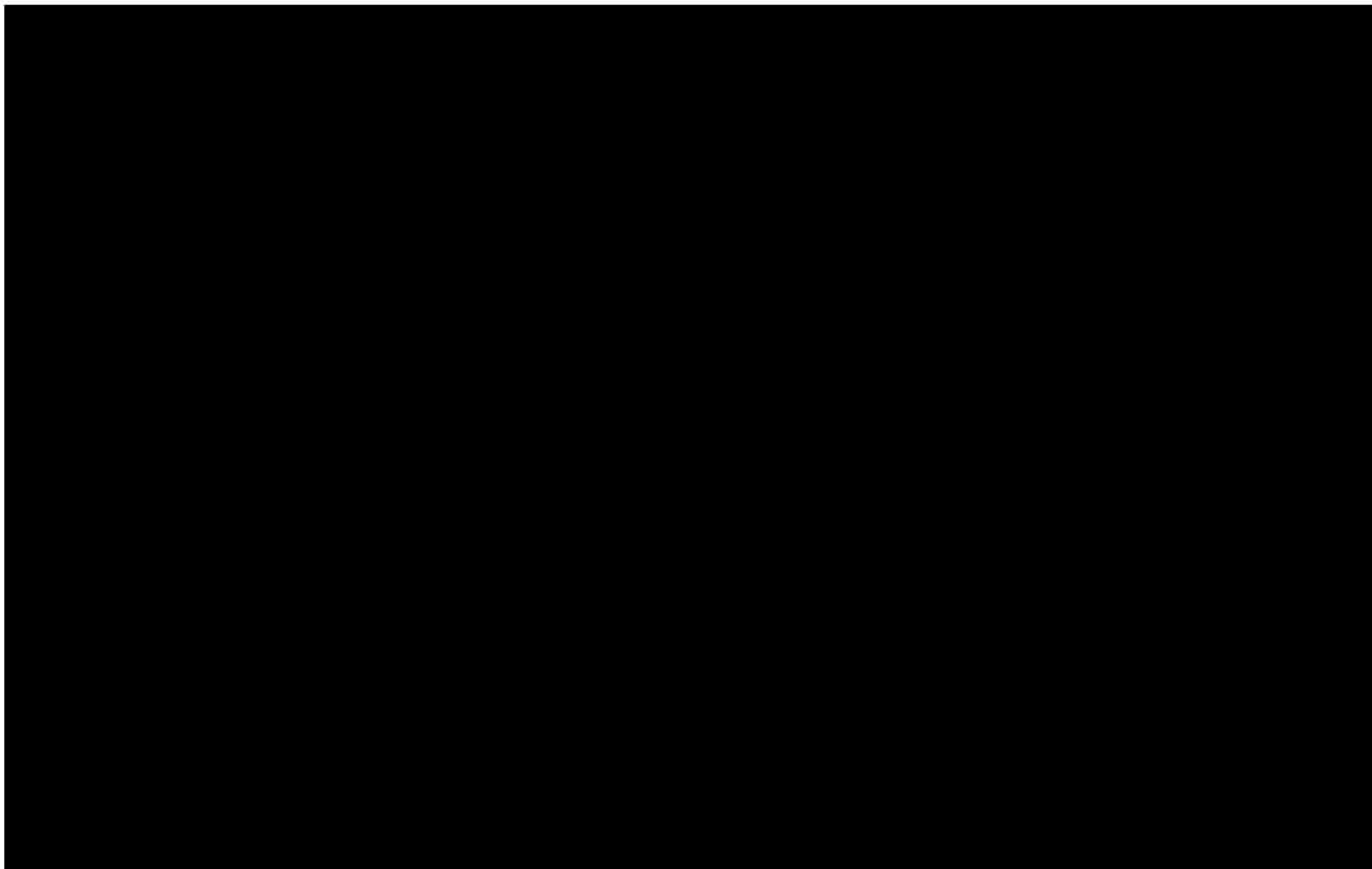


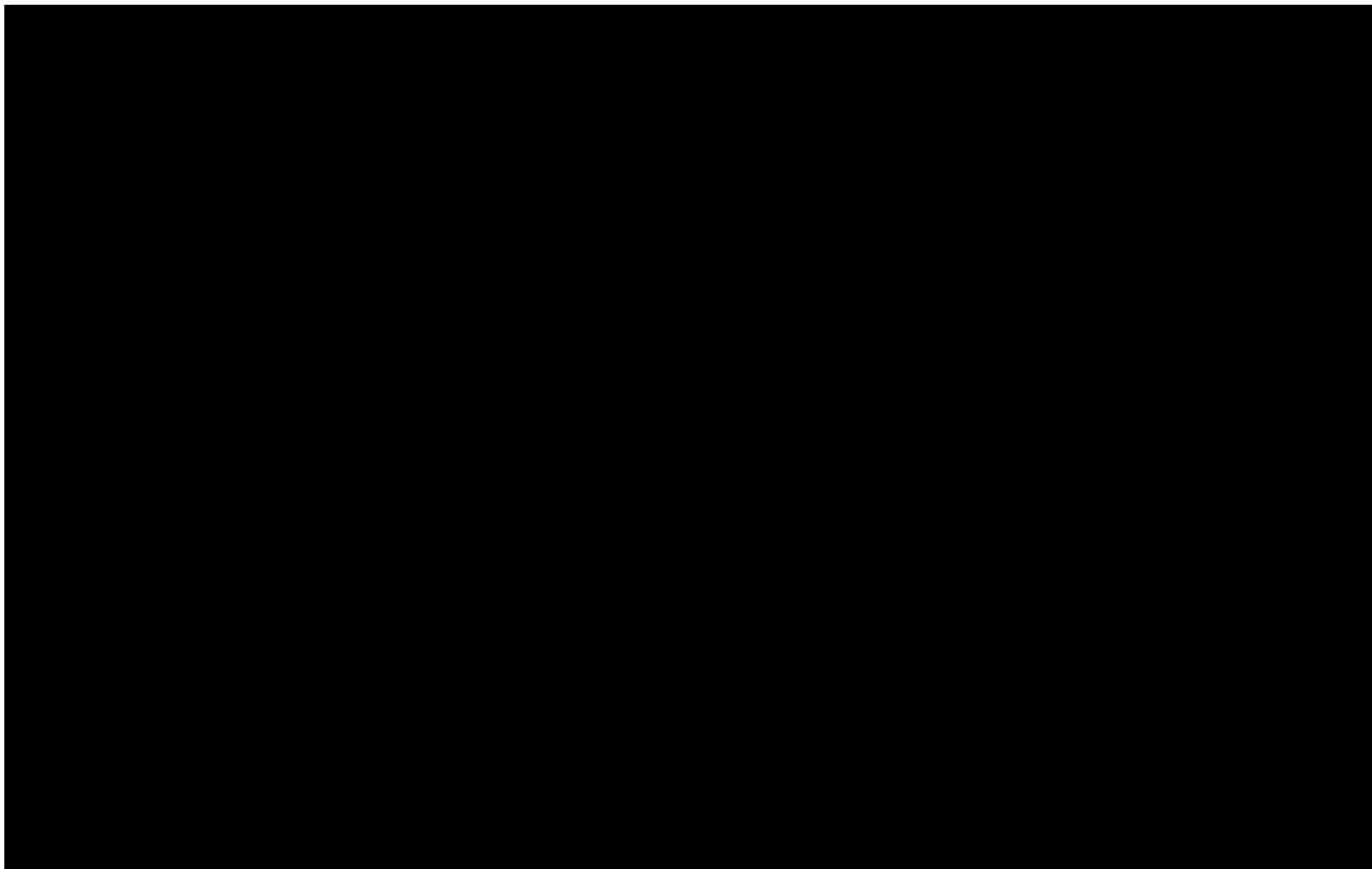


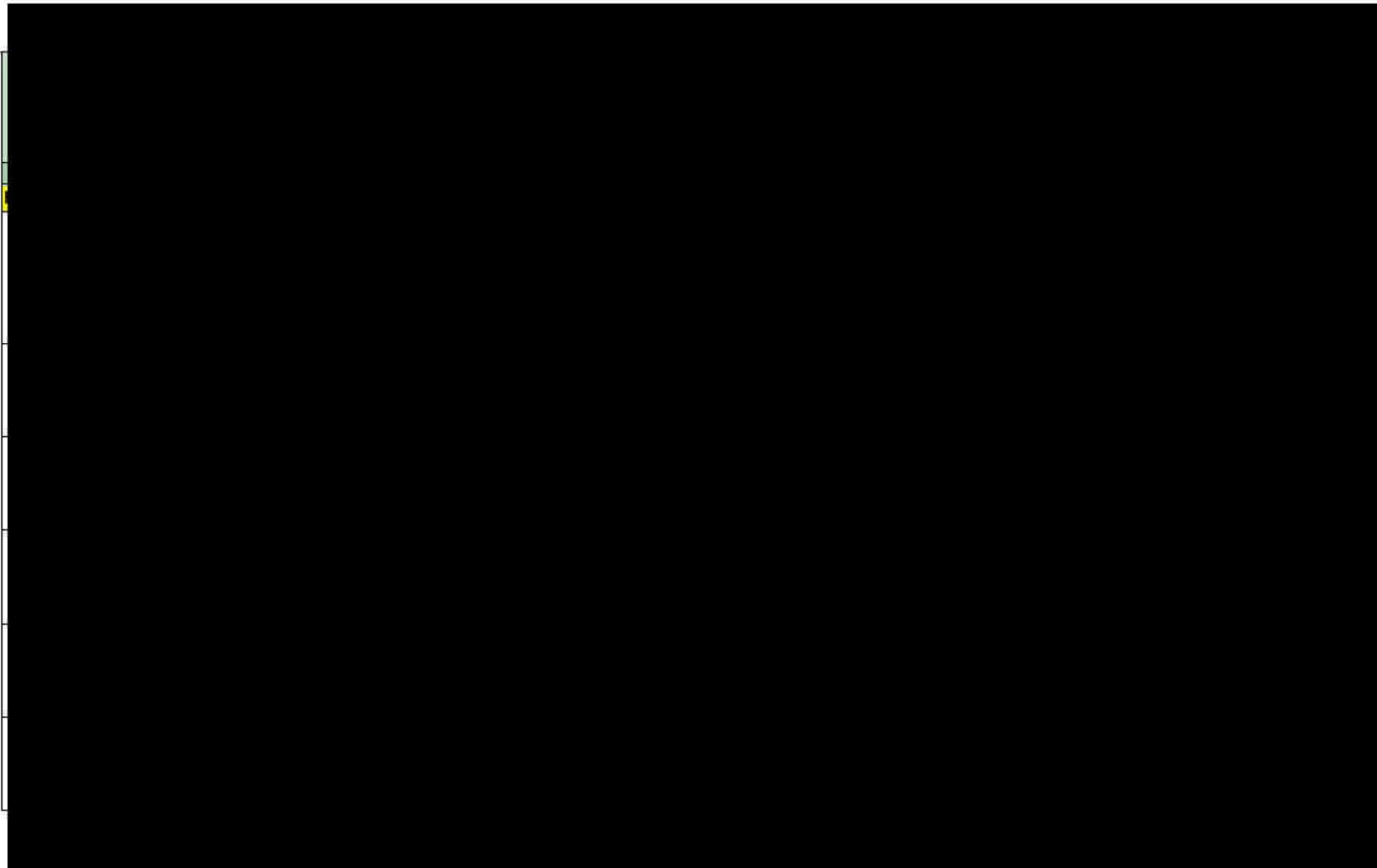




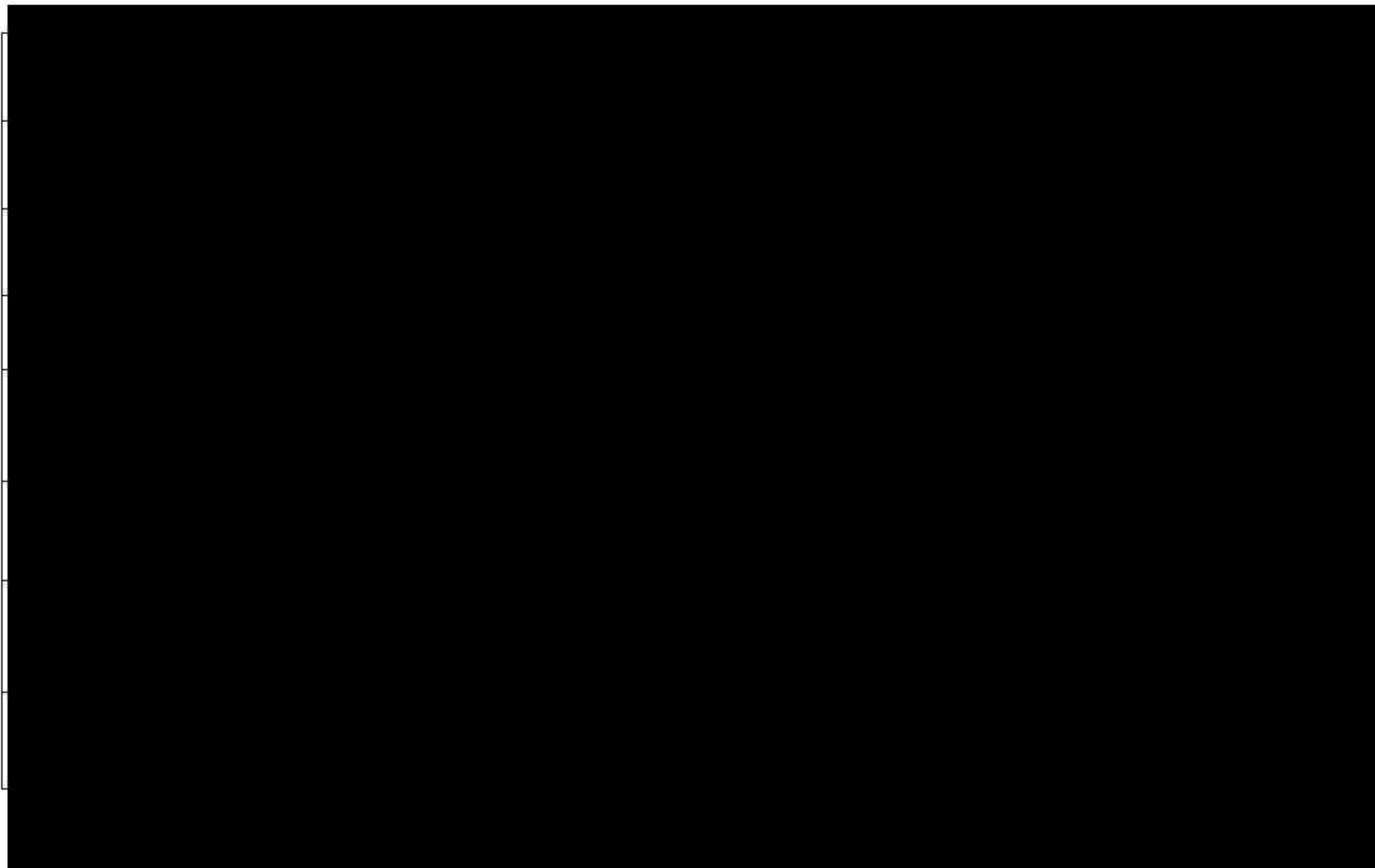


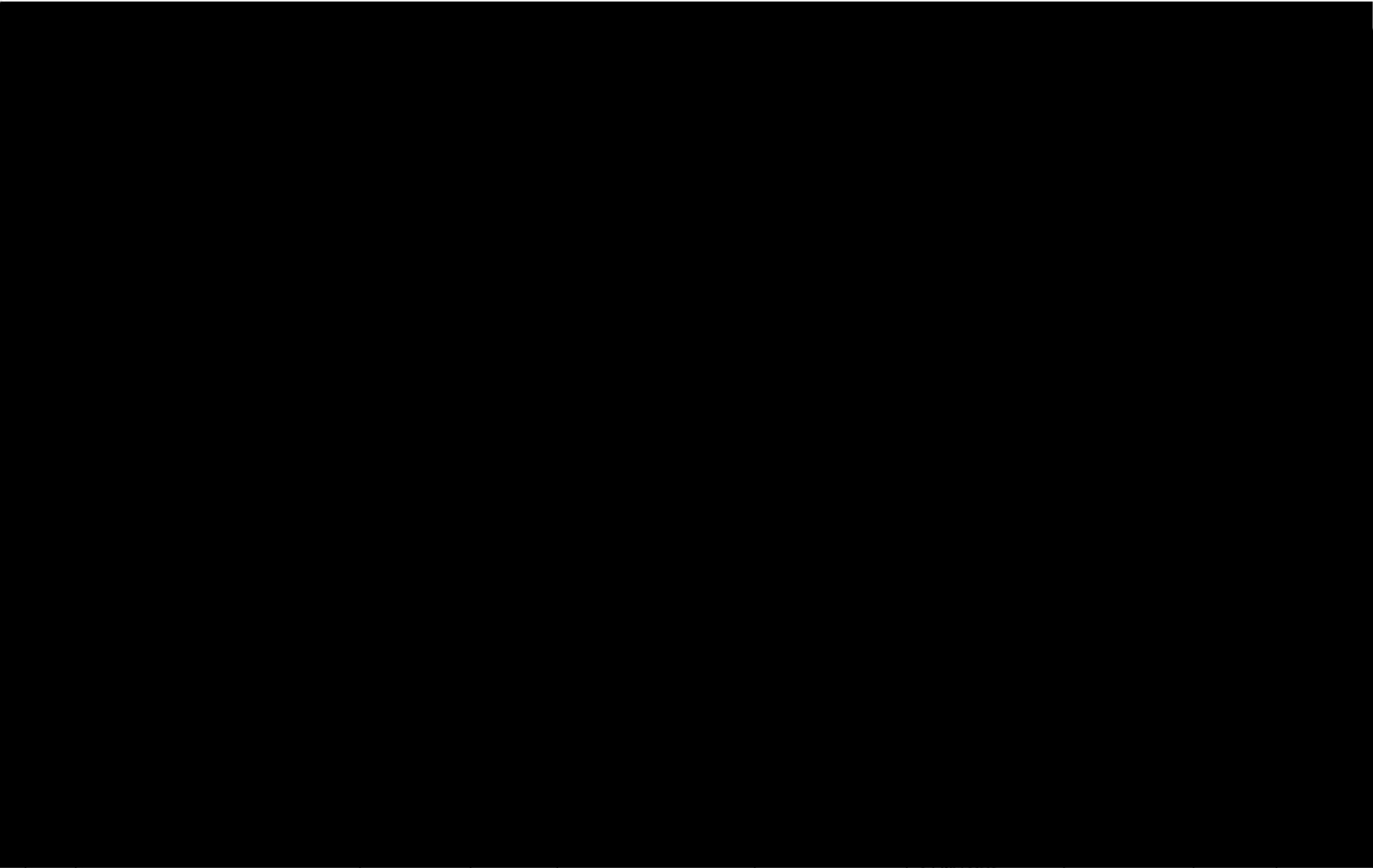


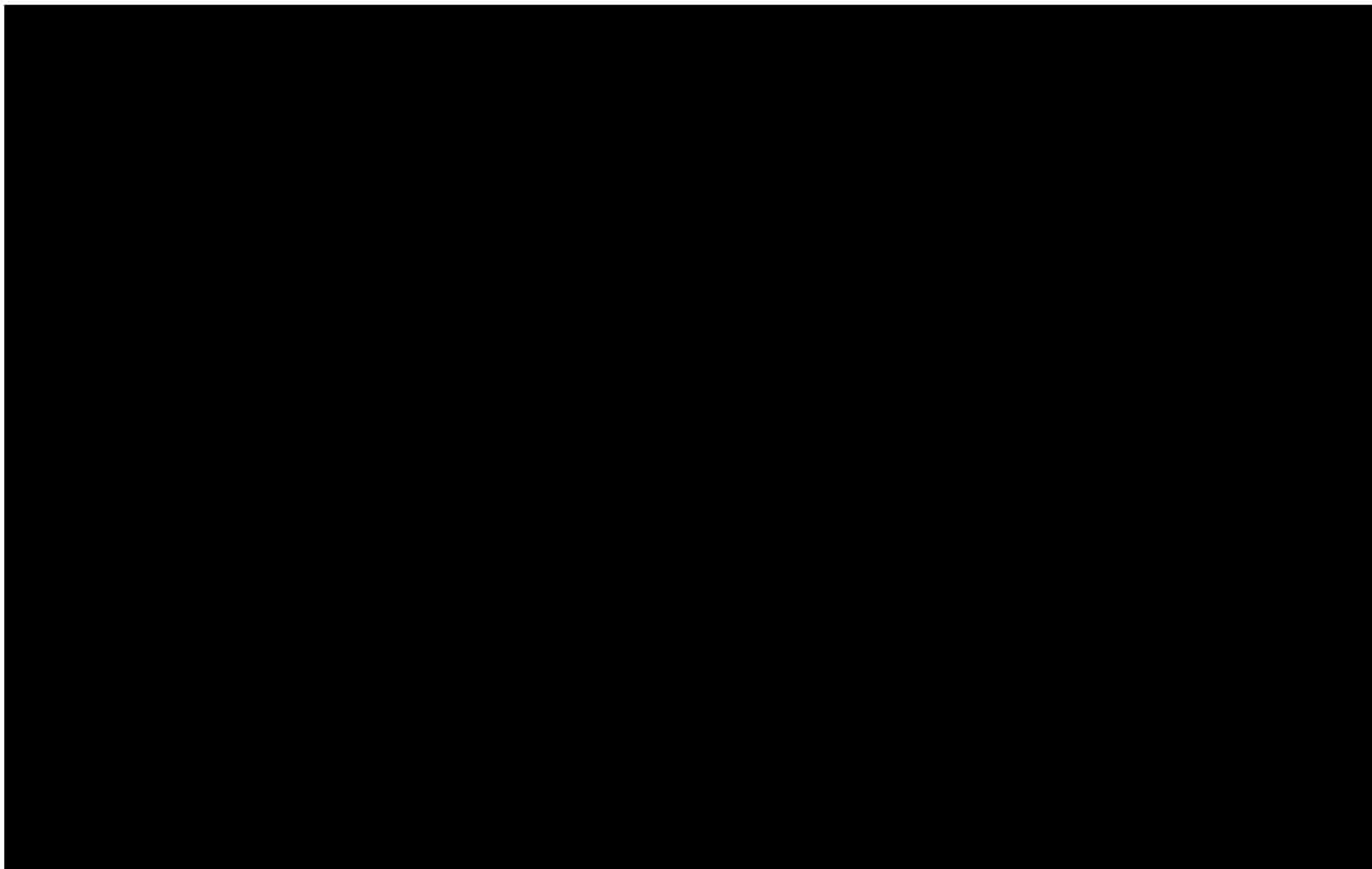




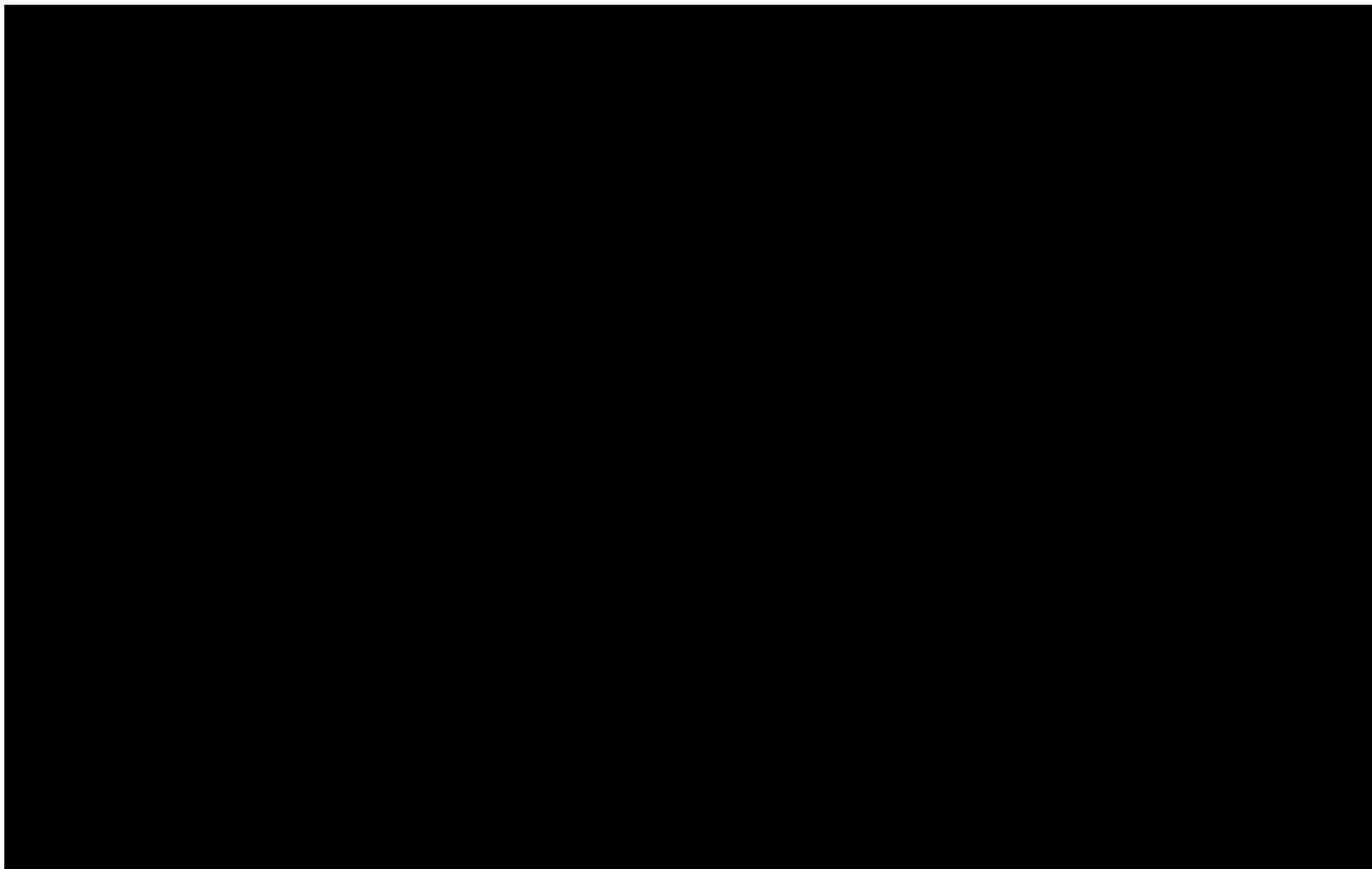
		Papua, Papua Barat							
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--











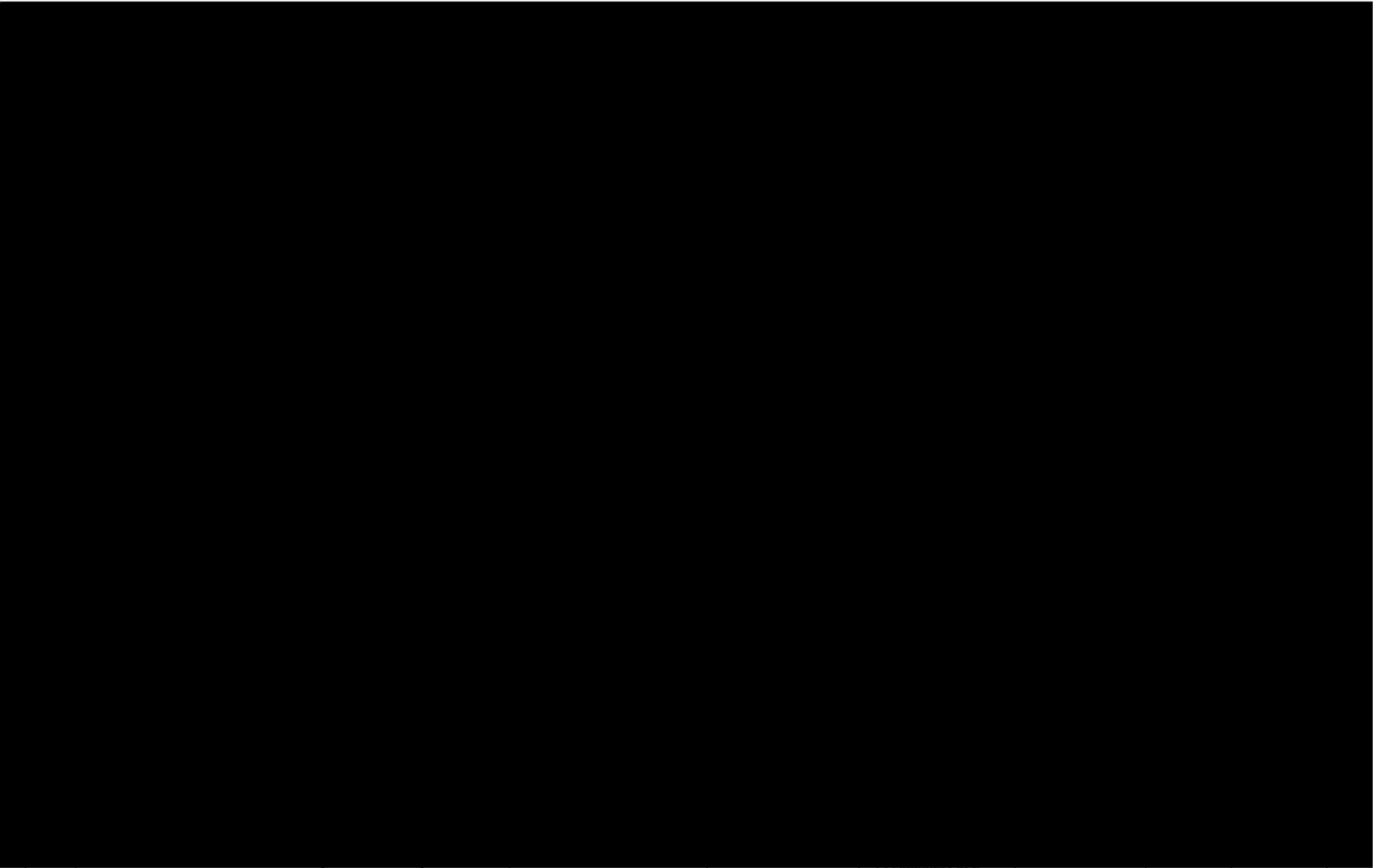
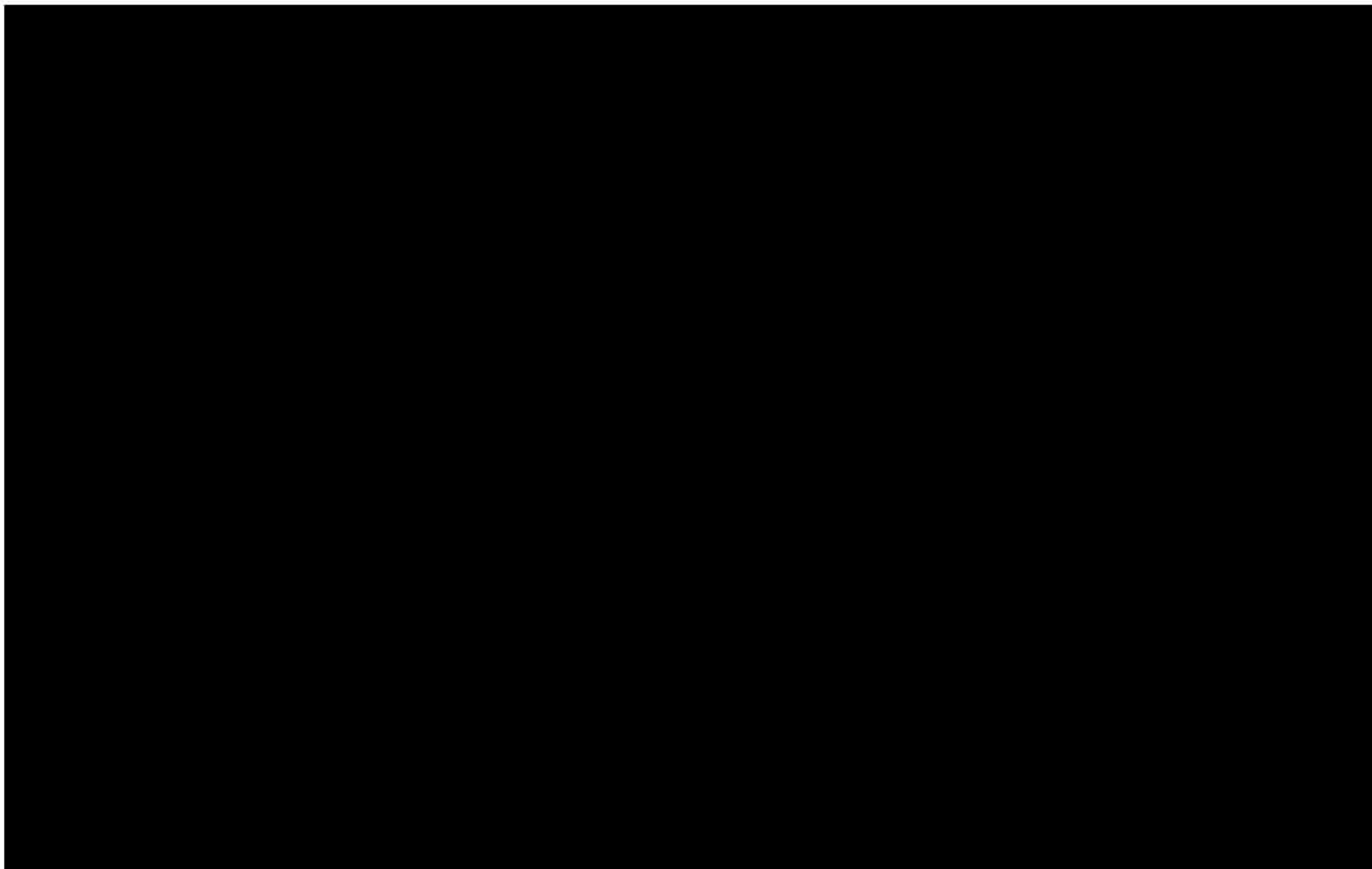
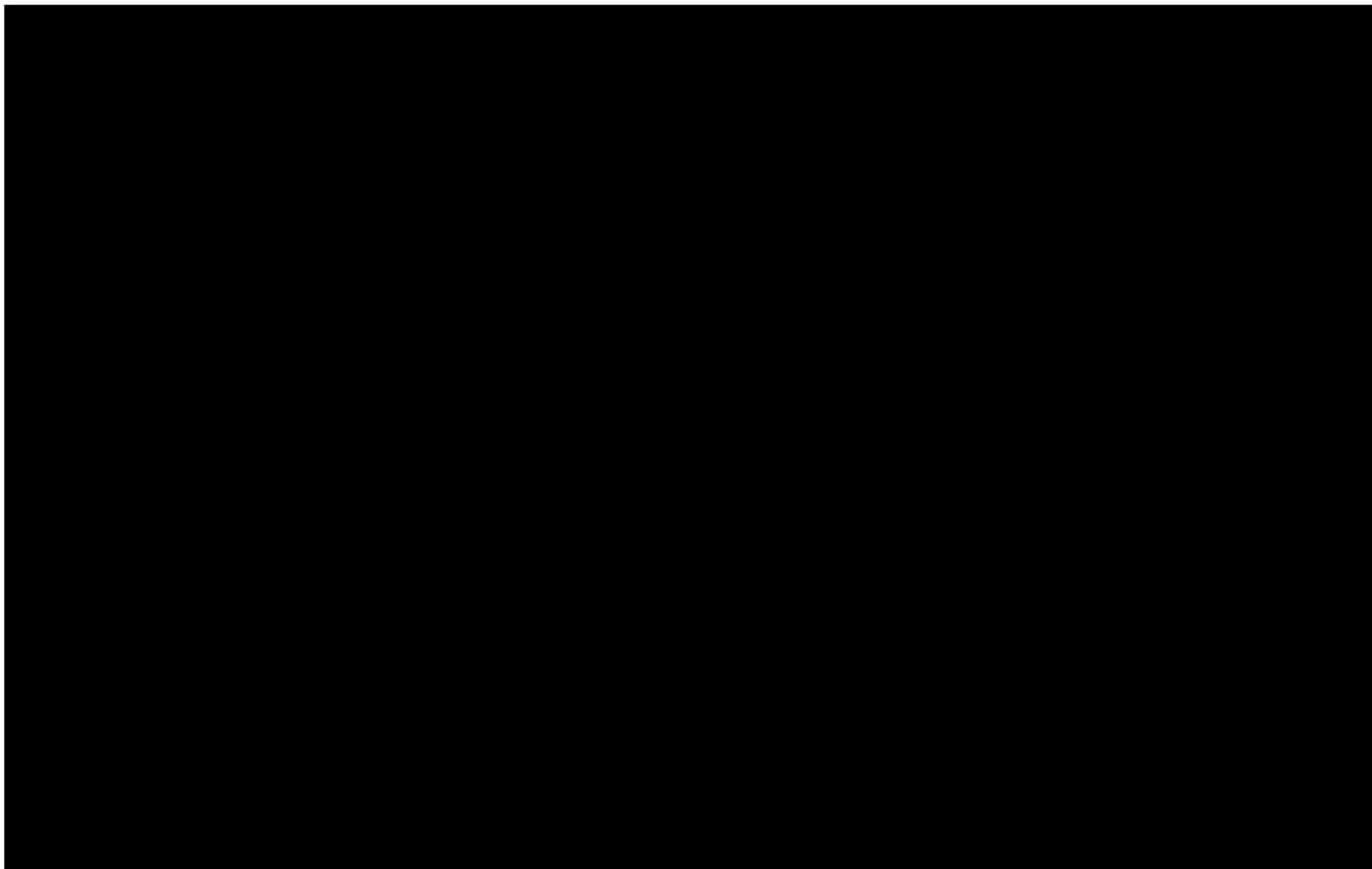


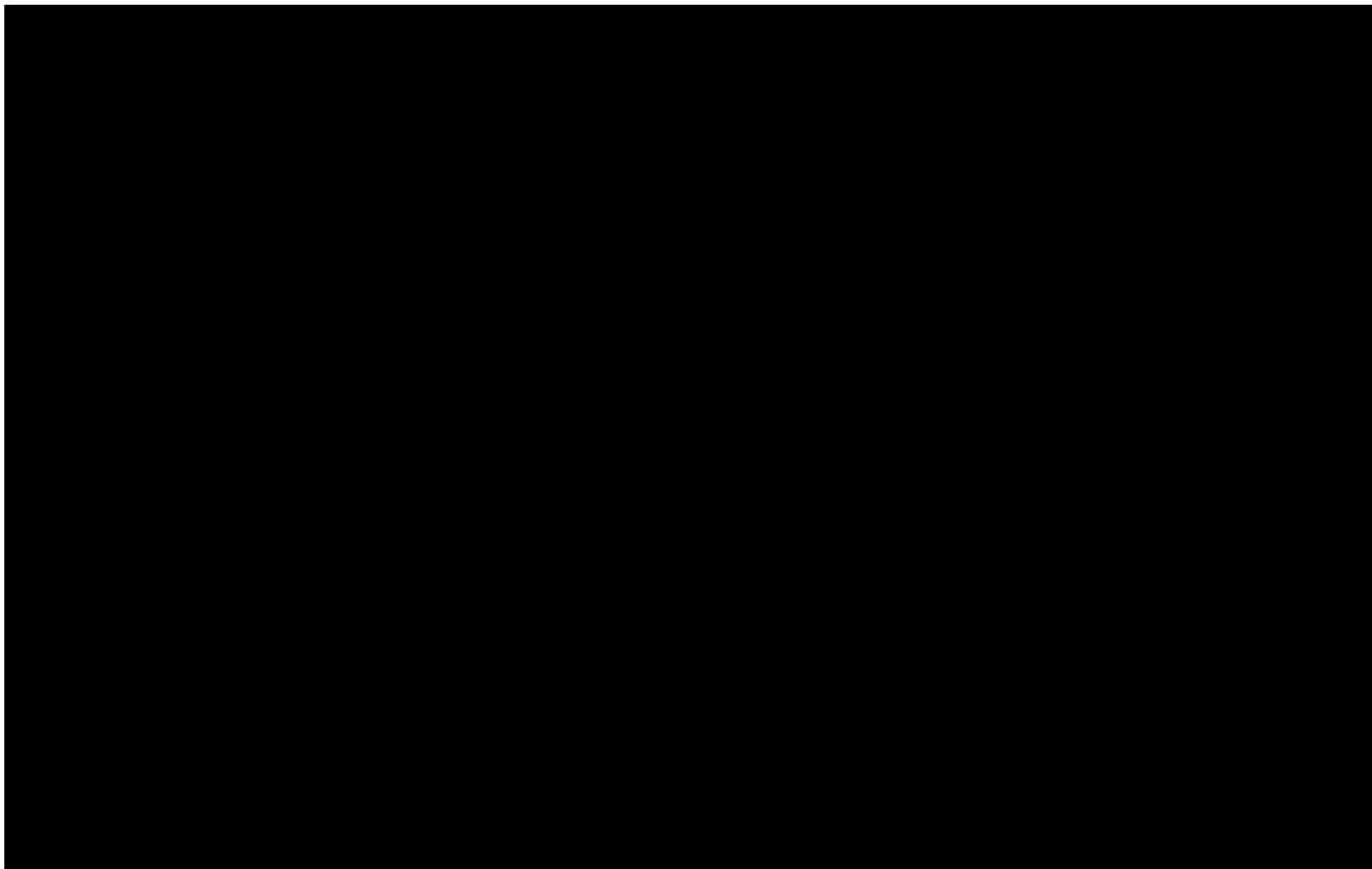
						Figure 1-1		
--	--	--	--	--	--	------------	--	--



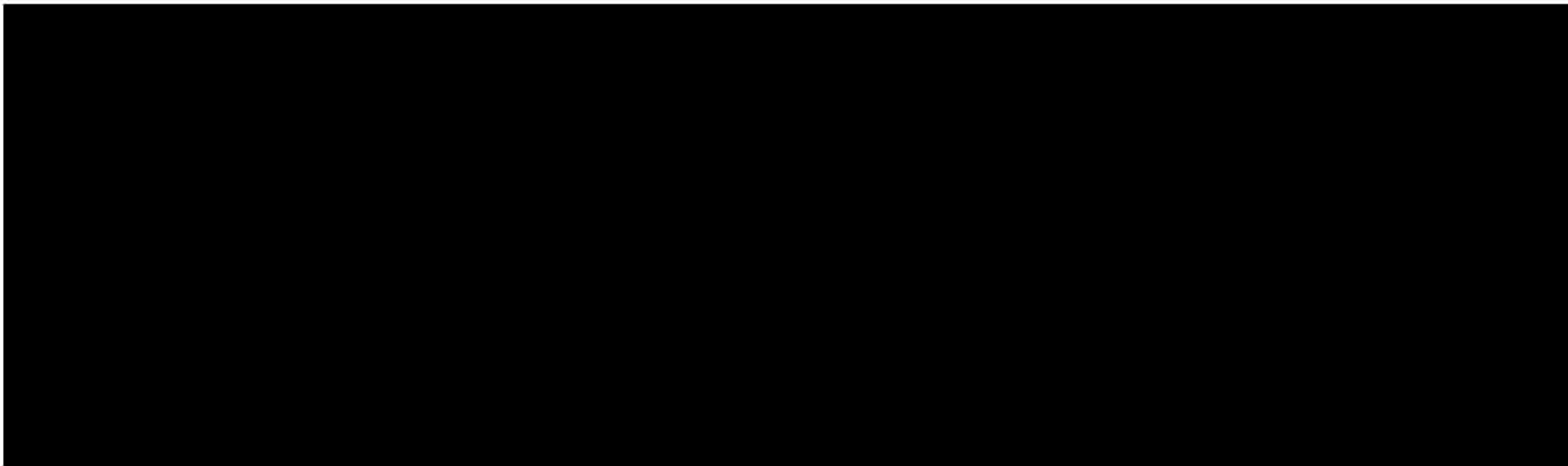


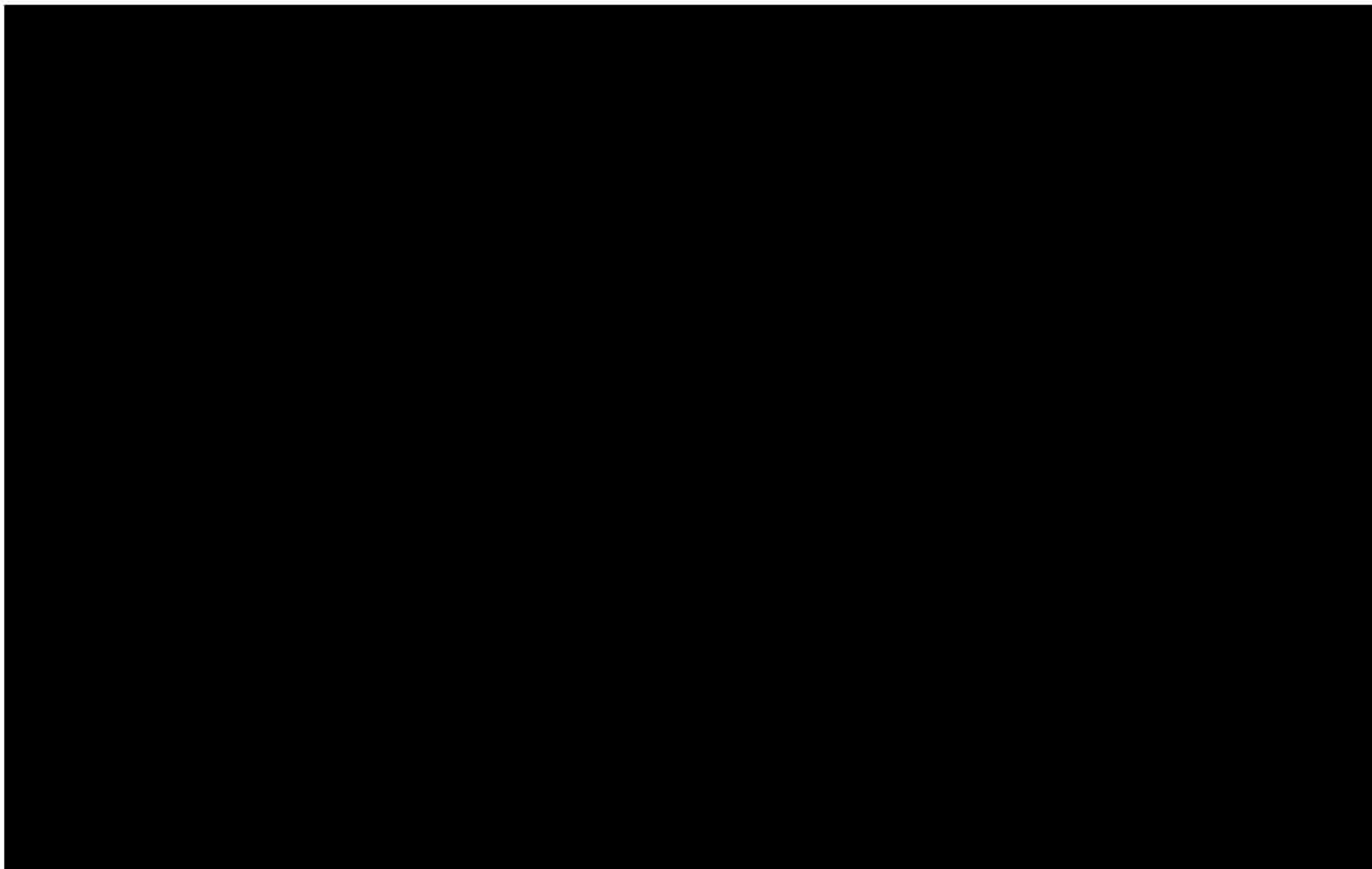


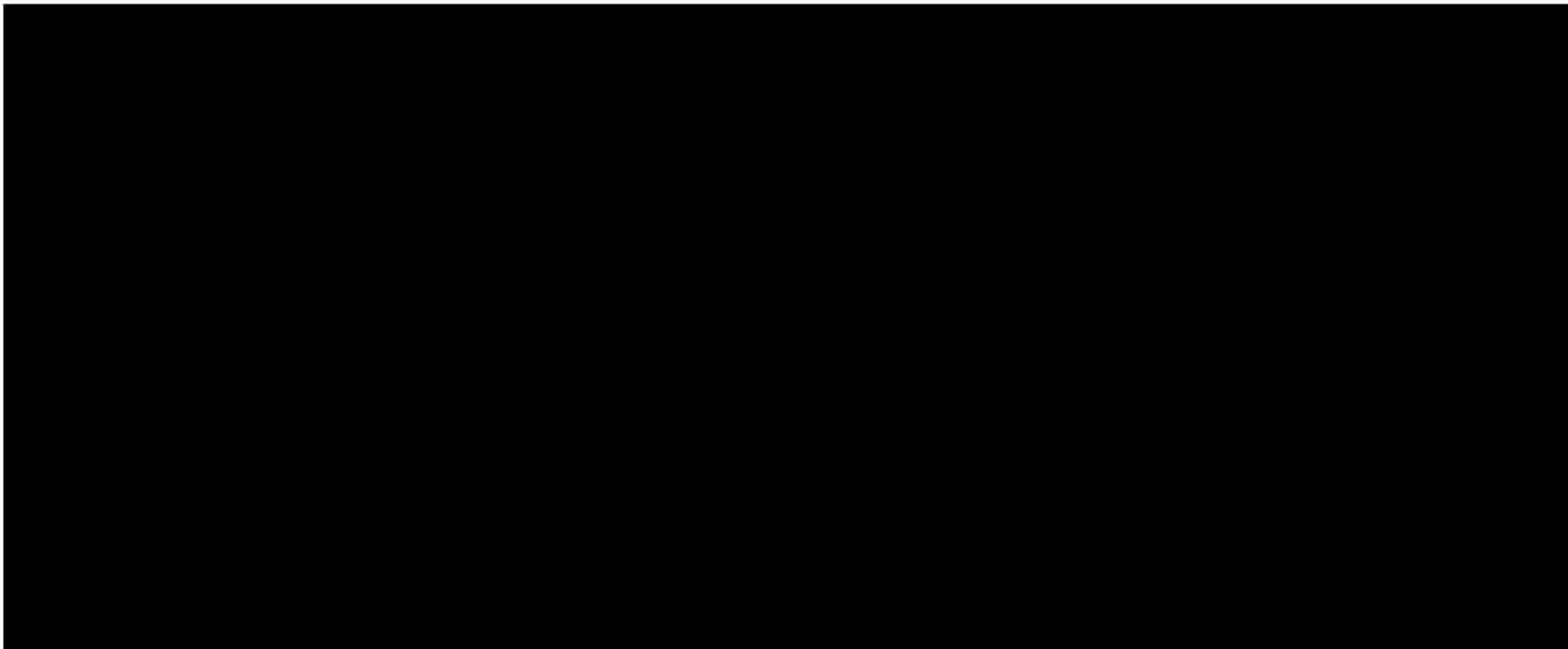


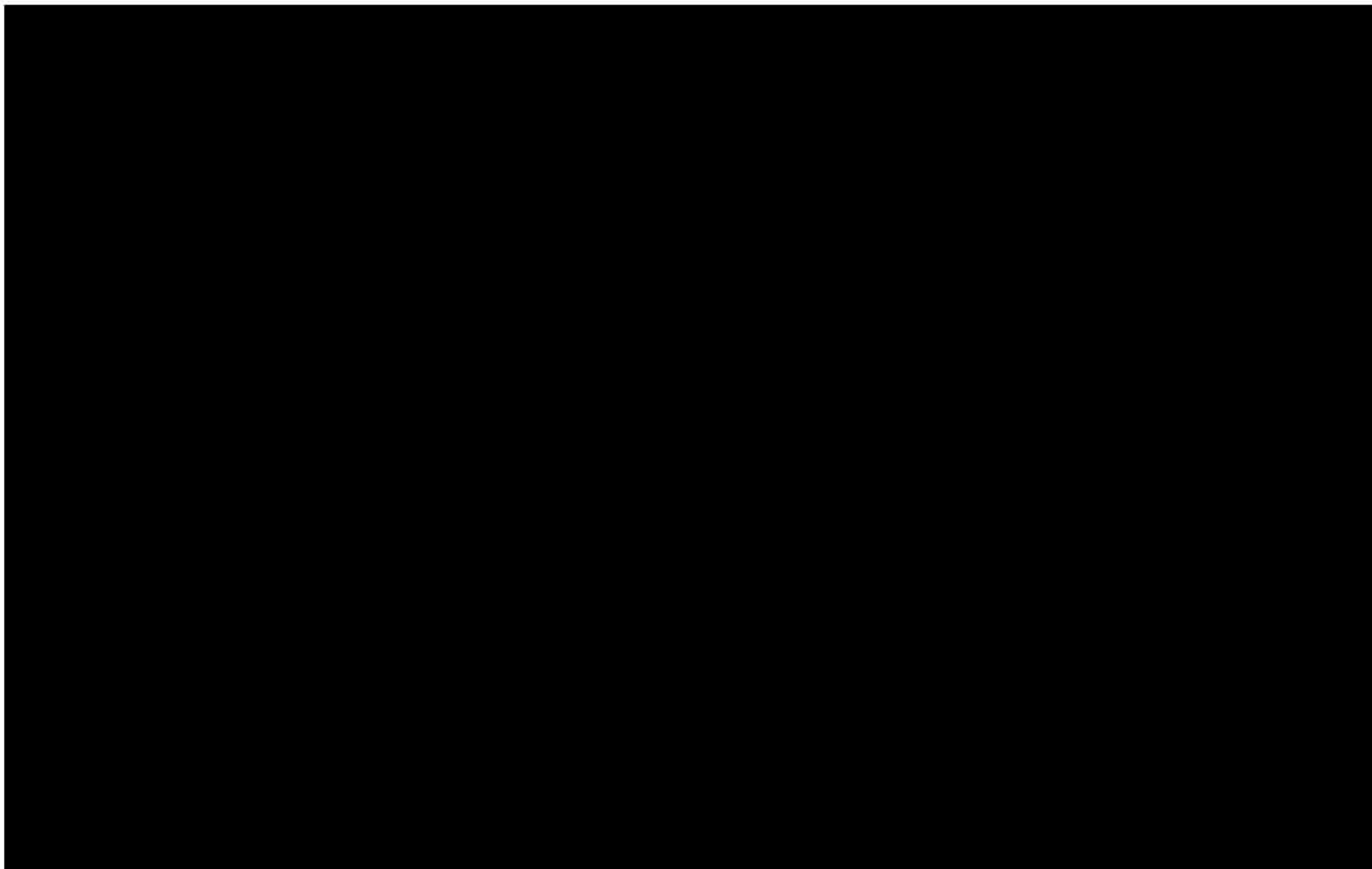


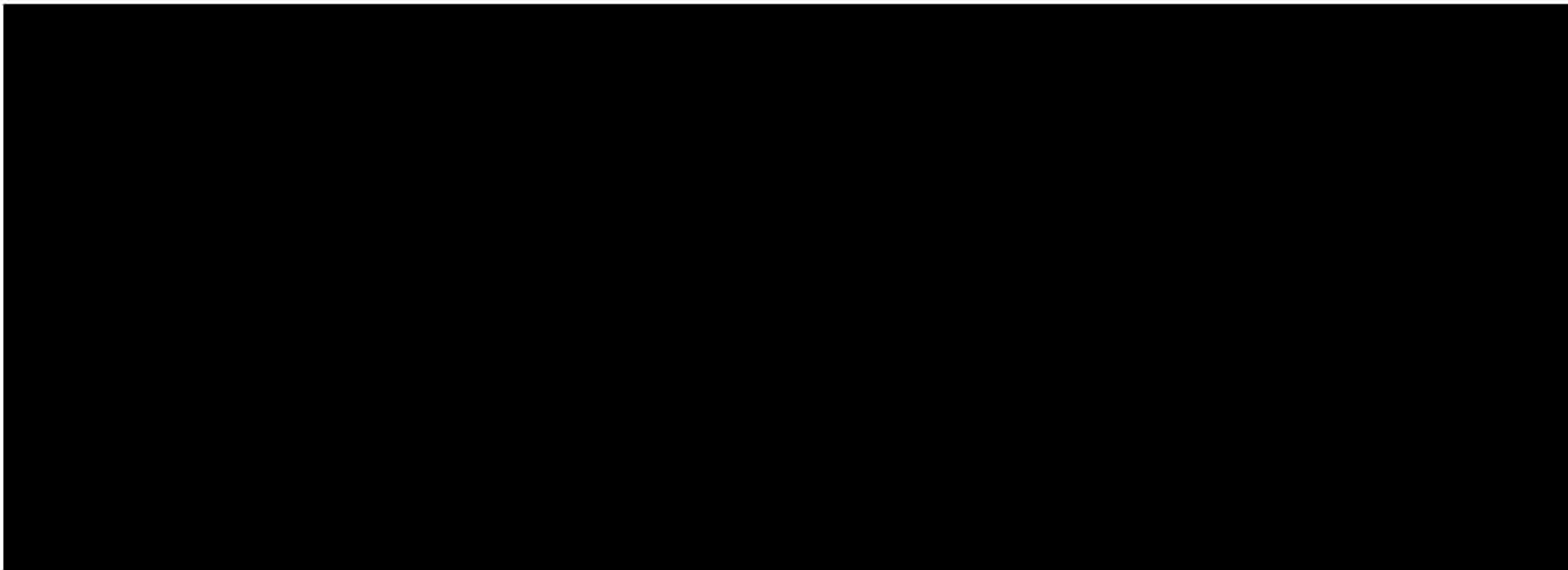












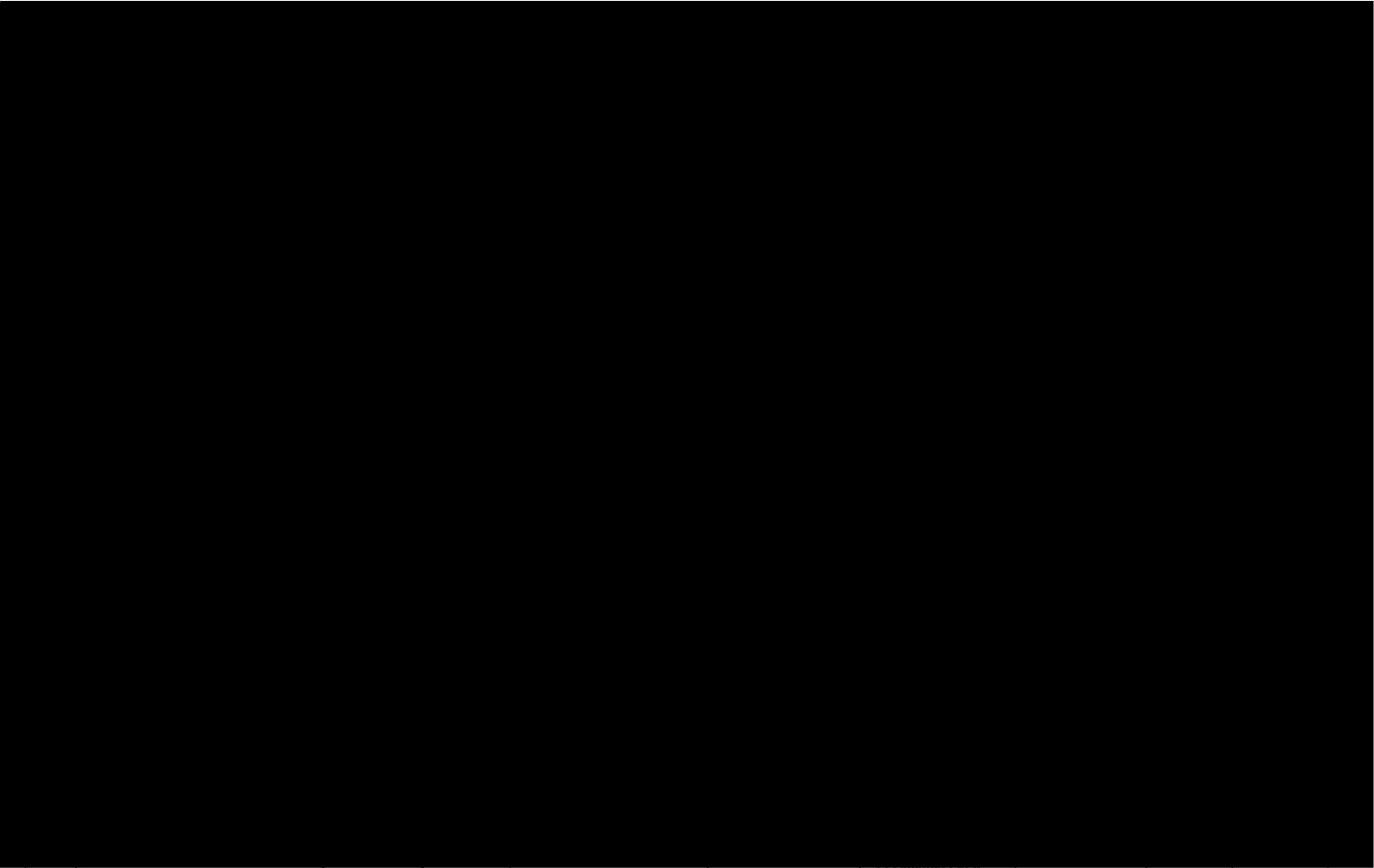


						Figure 1-1			
--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--



[REDACTED]

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

[REDACTED]

K E T E R A N G A N
NO : [REDACTED]

[REDACTED]

Nama Perusahaan : PT. LARAS SEMBADA
Berkedudukan : [REDACTED]
Nomor akta : [REDACTED]
Tgl akta : [REDACTED]

Bahwa atas pendirian perseroan tersebut pada waktu --
ini anggaran dasarnya dalam proses penyelesaian pada --
DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA. ---

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan --
seperlunya. ----- [REDACTED] -----

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

YS.

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :

Menimbang :

: Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988. ✓
tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

PT. LARAS SEMBADA

KEDUA :

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



KANTOR - NOTARIS

[REDACTED]
SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
No. [REDACTED]

DKI JAKARTA
[REDACTED]

AKTA

PERINTERTAN PERSEDOAN TERPINTIS

PT. LAMAS SEHADA

TANGGAL

NOMOR

TURUNAN / GROSSE

-PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. LARAS SEMBADA

-Nomor : [REDACTED]

Pada hari ini, [REDACTED]

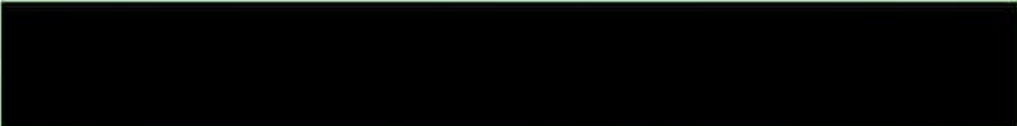
-Telah hadir dihadapan saya, [REDACTED]

[REDACTED] Notaris Pengganti berdasarkan Surat Ketetapan -
Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor ---

di-Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta --
ini dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para Penghadap, saya, Notaris kenal.-----

-Para Penghadap menerangkan bahwa dengan tidak -----
mengurangi ketentuan tentang pemberian izin dari Yang
Berwajib dengan ini didirikan satu Perseroan Terbatas -
yang tunduk pada anggaran dasar sebagai berikut:-----



NOTARIS



SALINAN

PERNYATAAN KEPUTUSAN Sirkuler

PARA PEMEGANG SAHAM

AKTA : _____
PT LARAS SEMBADA

NOMOR : _____

TANGGAL : _____

PENGHADAP : _____



PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER PARA PEMEGANG SAHAM

PT LARAS SEMBADA

Nomor : [REDACTED]

-Pada hari ini, [REDACTED]

-Berhadapan dengan saya, [REDACTED]

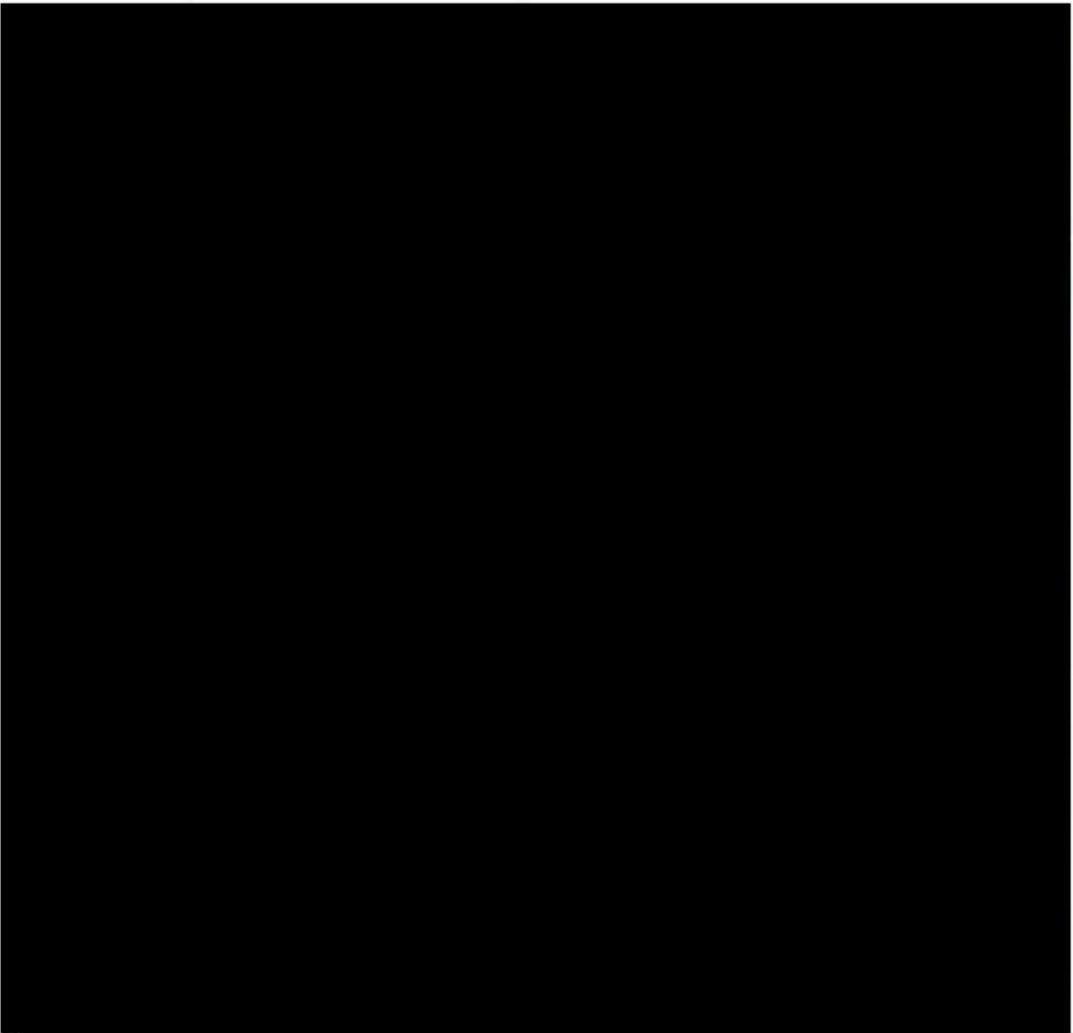
dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut
dalam akhir akta ini. -----

[REDACTED]

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan
kuasa yang dimuat dalam KEPUTUSAN SINGKULER PARA PEMEGANG
SAHAM PT LARAS SEMBADA, yang akan disebut di bawah; -----

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu: -----

[REDACTED]

- 
- Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, yang saya Notaris ---
kenal sebagai saksi-saksi. -----
 - Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani ---
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, serta telah
dibubuhi cap jempol kanan pada lembar tersendiri yang -----
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----
 - Dilangsungkan tanpa memakai perubahan. -----
 - Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. --
 - Diberikan sebagai salinan yan  -----

Notaris di Kabupaten Tangerang





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : [REDACTED]
Lampiran : [REDACTED]
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT LARAS SEMBADA

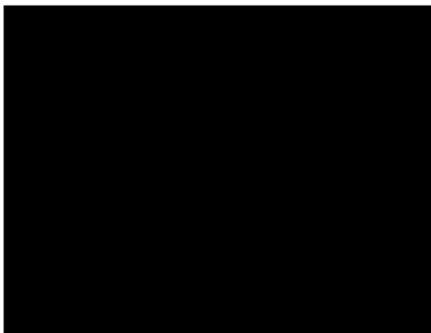
Kepada Yth.



Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan [REDACTED]
[REDACTED] mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, **PT LARAS SEMBADA**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, [REDACTED]

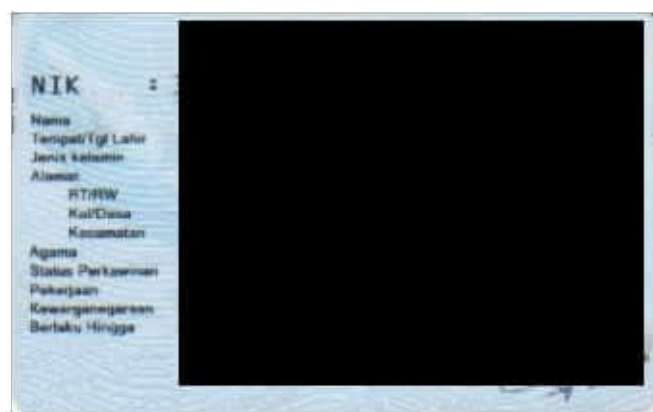
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Direktu Utama



Direktur



Komisaris





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN
KPP PRATAMA JAKARTA TEBET

JL. TEBET RAYA 9, JAKARTA SELATAN
TELEPON 021-8296869, 8296937; FAKSIMILE 021-8296901; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 021-500200
EMAIL perigaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor: S-2602KT/WPJ.04/KP.0303/2015

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : PT. LARAS SEMBADA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.345.423.6-015.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 70100 - KEGIATAN KANTOR PUSAT
4. Alamat : GD.PERKANTORAN
EIGHTYEIGHT@KASABLANKA OFFICE TOWER
LT.10 UNIT E, JL CASABLANCA KAV 88 NO.
RT. RW.
5. Kategori : -
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 05 FEBRUARI 1990
7. Kewajiban Pajak :

PPh Sendiri: [v] PPh Pasal 25 [] PPh Pasal 25 OPPT [v] PPh Pasal 29 [] PPh Final PPN: [] Pemungutan PPN [] PPN Kegiatan Membangun Sendiri	Pemotongan dan Pemungutan PPh: [v] PPh Pasal 4 ayat (2) [v] PPh Pasal 15 [v] PPh Pasal 19 [v] PPh Pasal 21 [] PPh Pasal 22 [v] PPh Pasal 23 [v] PPh Pasal 26
--	---

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 23 Februari 2009.

Jakarta Selatan, 27 Maret 2015

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

PUSUH BUDISANTOSO⁴
NIP 197108141997031001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN
KPP PRATAMA JAKARTA TEBET

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

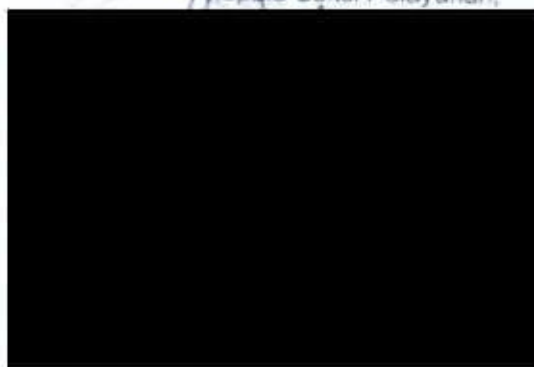
Nomor: [REDACTED]

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : [REDACTED]
2. Nama : PT. LARAS SEMBADA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : [REDACTED]
4. Alamat : [REDACTED]
5. Merk Dagang/Usaha : [REDACTED]
6. Kewajiban Pajak : [REDACTED]

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak [REDACTED]

Jakarta Selatan, [REDACTED]
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



npvp.

KPP PRATAMA

PT. LARAS SEMBADA

[e-Form] Bukti Penerimaan Elektronik

Kotak Masuk ✕



Direktorat Jenderal Pajak <efiling@pajak.go.id>

kepada saya ▾

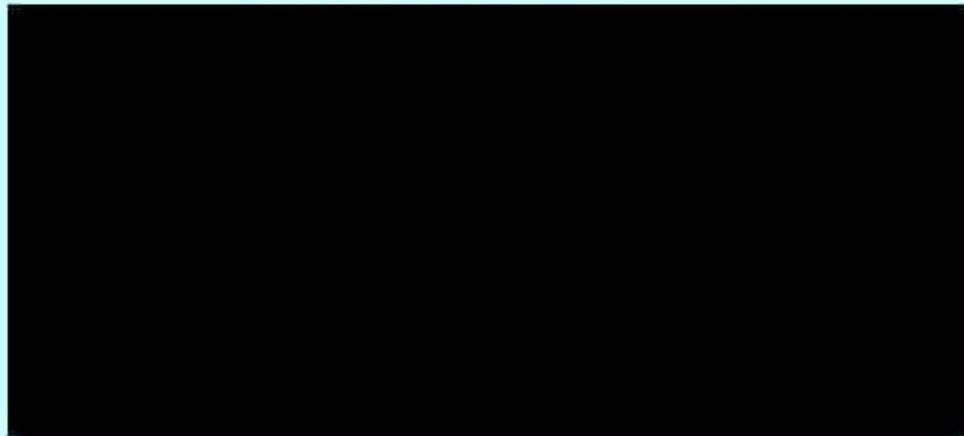
Penyampaian SPT Elektronik

📌 Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : LARAS SEMBADA

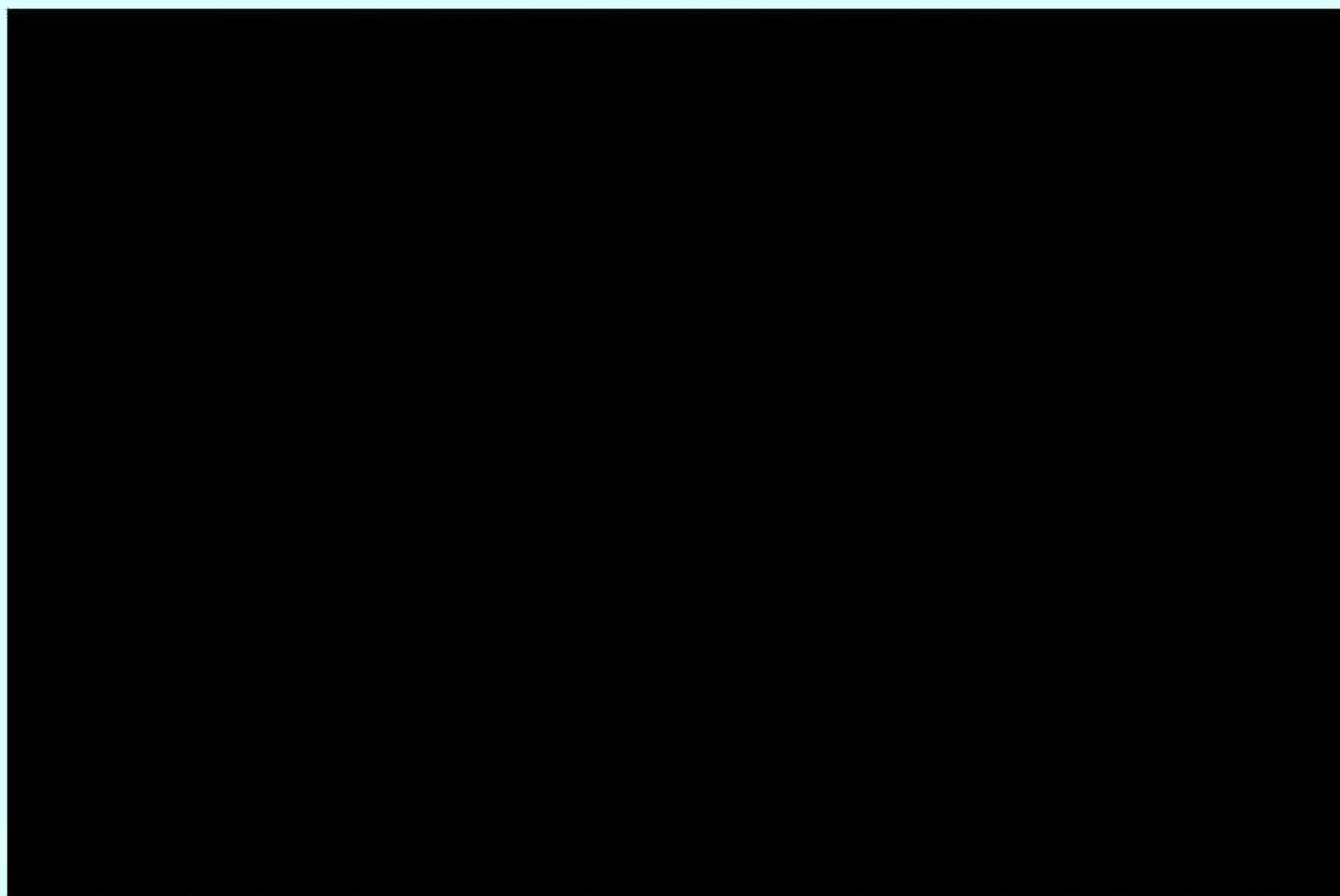
NPWP : [REDACTED]



Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : LARAS SEMBADA



Halo, LARAS SEMBADA 

Petunjuk Pengisian

- Modul Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) digunakan untuk pengecekan status wajib pajak
- Modul Surat Keterangan Fiskal (SKF) digunakan untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Fiskal
- Modul SKD SPDN digunakan untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Domisili untuk Wajib Pajak Dalam Negeri
- Modul Surat Keterangan PP 23 digunakan untuk permohonan Surat Keterangan Masuk dalam skema PP 23
- Modul SKJLN digunakan untuk permohonan Surat Keterangan Jasa Luar Negeri
- Modul Fasilitas PPh Pasal 21 DTP (PMK 9 2021) digunakan untuk permohonan Fasilitas PPh Pasal 21 DTP sesuai

 PROFIL WAJIB PAJAK

NPWP



NAMA WP

LARAS SEMBADA

ALAMAT

 PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Untuk Keperluan

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) 

NO	VARIABEL	STATUS	KETERANGAN
1	NPWP	Valid	
2	SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid	

PROFIL >

PERATURAN >

UNDUH >

INFORMASI PUBLIK >

INTERNASIONAL >

Pajak Kita, Untuk Kita

[Terian Keuangan](#)[APBN Kita](#)[Edukasi Pajak](#)[Reformasi Perpajakan](#)[Prasyarat](#)[Hubungi Kami](#)[Kritik & Saran](#)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : [REDACTED]**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT LARAS SEMBADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : [REDACTED] |
| 3. Alamat Kantor | : [REDACTED] |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : [REDACTED] |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 71102 - Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI |
| 7. Lokasi Usaha | : [REDACTED] |
| 8. Status | : [REDACTED] |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: -

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: [REDACTED]

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : [REDACTED]

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. - Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan - Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: [REDACTED]**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : PT LARAS SEMBADA
2. Alamat Kantor :

No. Telepon :
Email :
3. Status Penanaman Modal :
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
5. Skala Usaha :

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: [REDACTED]

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**

[REDACTED]
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: [REDACTED]

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: [REDACTED]

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	[REDACTED]	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	71101	Aktivitas Arsitektur	[REDACTED]	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI

PB-UMKU: [REDACTED]

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | PT LARAS SEMBADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | [REDACTED] |
| 3. Alamat Kantor | : | [REDACTED] |
| 4. Status Penanaman Modal | : | [REDACTED] |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | 71102 - Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI |
| 6. Lokasi Usaha | : | [REDACTED] |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: [REDACTED]

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

[REDACTED]
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: [REDACTED]

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN

PB-UMKU: [REDACTED]

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. LARAS SEMBADA:

Asosiasi yang diikuti :
Nama PJBU :
Nama PJTBU :
Nama PJTBU 2 :
E-mail :
NPWP :
Jenis Usaha :
Nomor Registrasi LPJK :
Ditetapkan tanggal :
Masa Berlaku s.d. :



Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Menengah	RK001	Umum	71102	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian	
Pelaksana sertifikasi : Lembaga Sertifikasi INKINDO						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



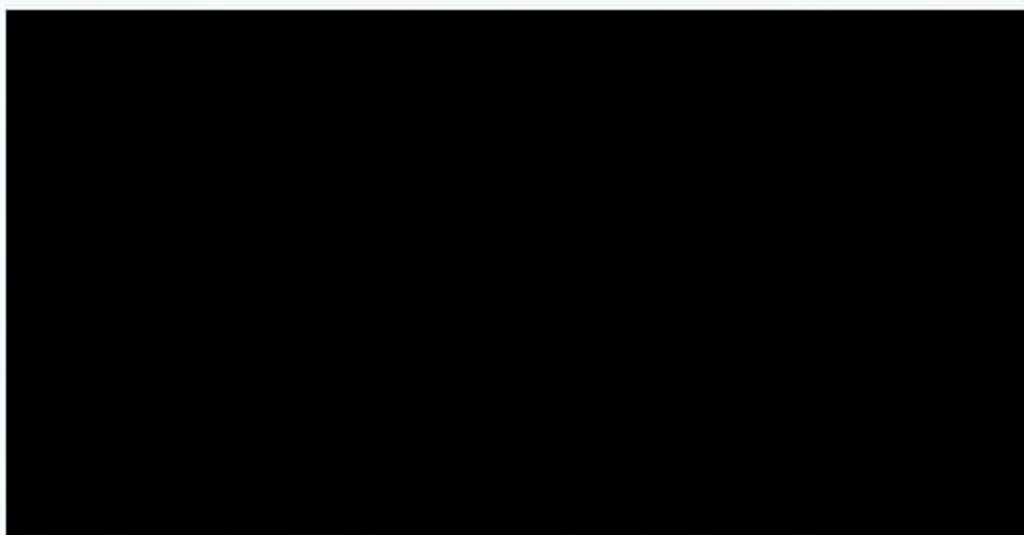
Balai
Sertifikasi
Elektronik

PT. LARAS SEMBADA
LAPORAN KEUANGAN



DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT. LARAS SEMBADA
DAFTAR ISI





PT. LARAS SEMBADA

Architecture - Engineering and Management Consultant



SURAT PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL [REDACTED]
PT. LARAS SEMBADA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat Kantor :

Jabatan :

Menyatakan bahwa :

1.

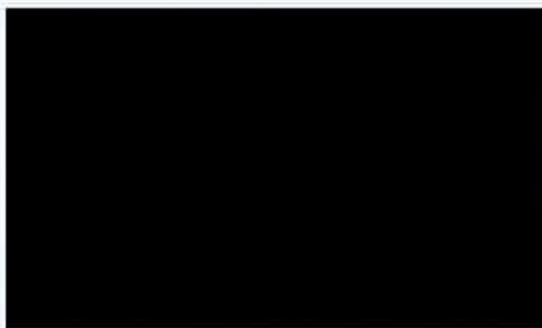
2.

3.

4.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, [REDACTED]



PT. LARAS SEMBADA

Neraca



ASET

Aset Lancar

Kas dan setara kas

Piutang usaha

Piutang lain-lain

Pekerjaan dalam pelaksanaan

Jumlah aset lancar

Aset Tetap

Harga perolehan

Akumulasi penyusutan

Nilai buku

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

Kewajiban lancar

Utang bank

Utang pajak

Jumlah kewajiban lancar

Kewajiban jangka panjang

Utang bank

Leasing

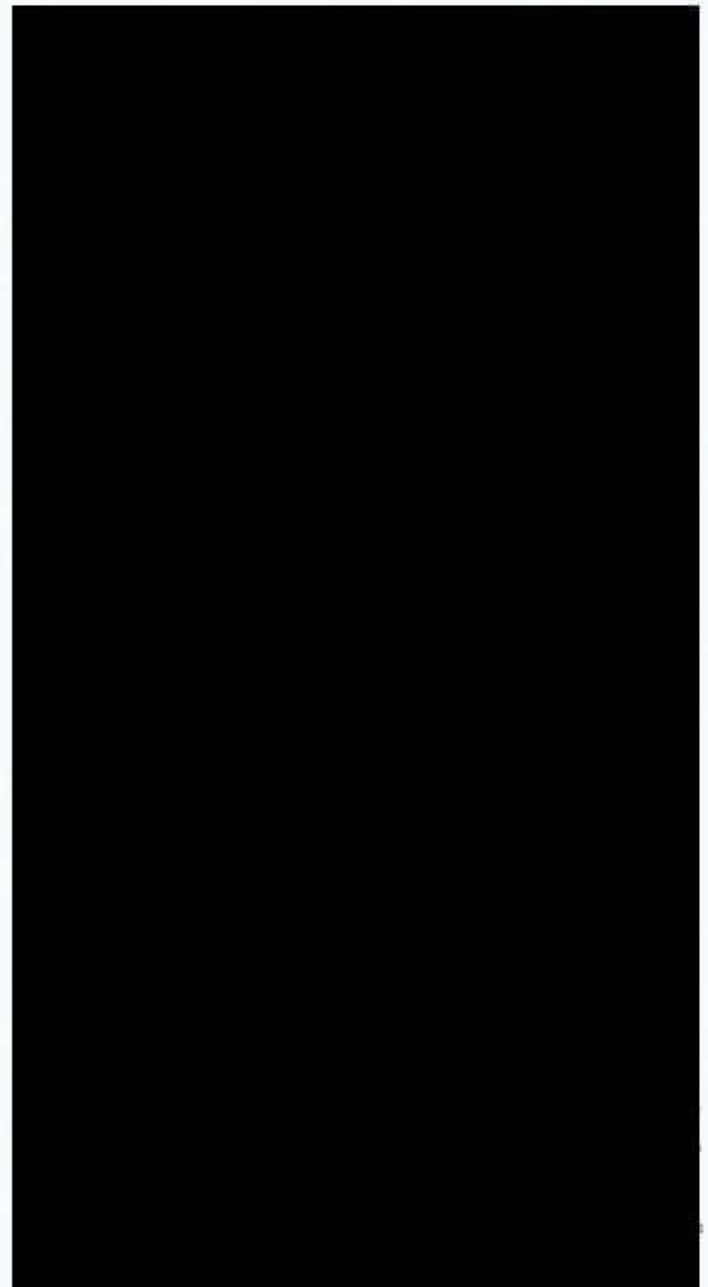
EKUITAS

Modal saham

Saldo laba

Jumlah ekuitas

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS



Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT. LARAS SEMBADA

Laporan laba rugi



PENDAPATAN USAHA

Penjualan

Beban pokok penjualan

Laba kotor

Beban operasi

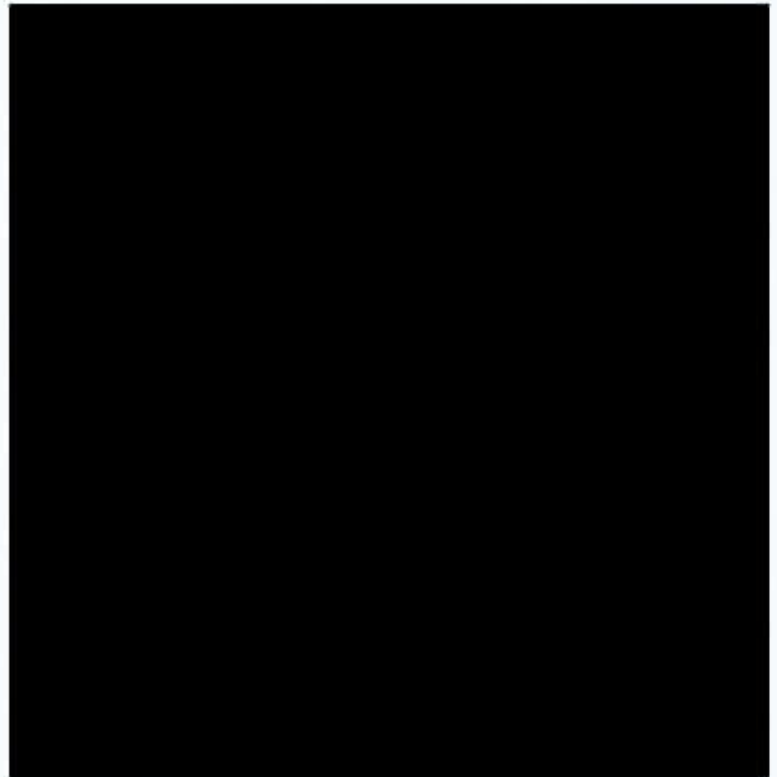
Laba operasi

Pendapatan (beban) lain-lain

Laba sebelum pajak

Pajak penghasilan badan

Laba bersih



Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT. LARAS SEMBADA
Laporan perubahan ekuitas

--

Saldo
Laba
Saldo
Laba
Saldo

--

--

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT. LARAS SEMBADA

Laporan arus kas

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Arus kas dari aktivitas operasi

Laba bersih

Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi:

Beban penyusutan

Laba operasi sebelum perubahan modal kerja

(Kenaikan)/penurunan :

Piutang usaha

Piutang lain-lain

Pekerjaan dalam penyelesaian

Kenaikan/(penurunan) :

Utang bank

Utang pajak

Utang bank KI

Utang Leasing

Jumlah kas yang tersedia dari operasi

Arus kas dari aktivitas investasi

Pembelian aset tetap

Kas bersih dari aktivitas investasi

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas

Saldo kas dan setara kas pada awal tahun

Saldo kas dan setara kas pada akhir tahun

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

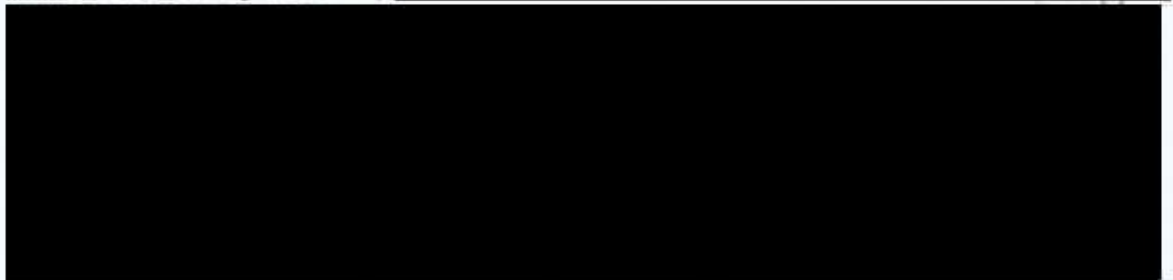
PT. LARAS SEMBADA
Catatan atas Laporan Keuangan



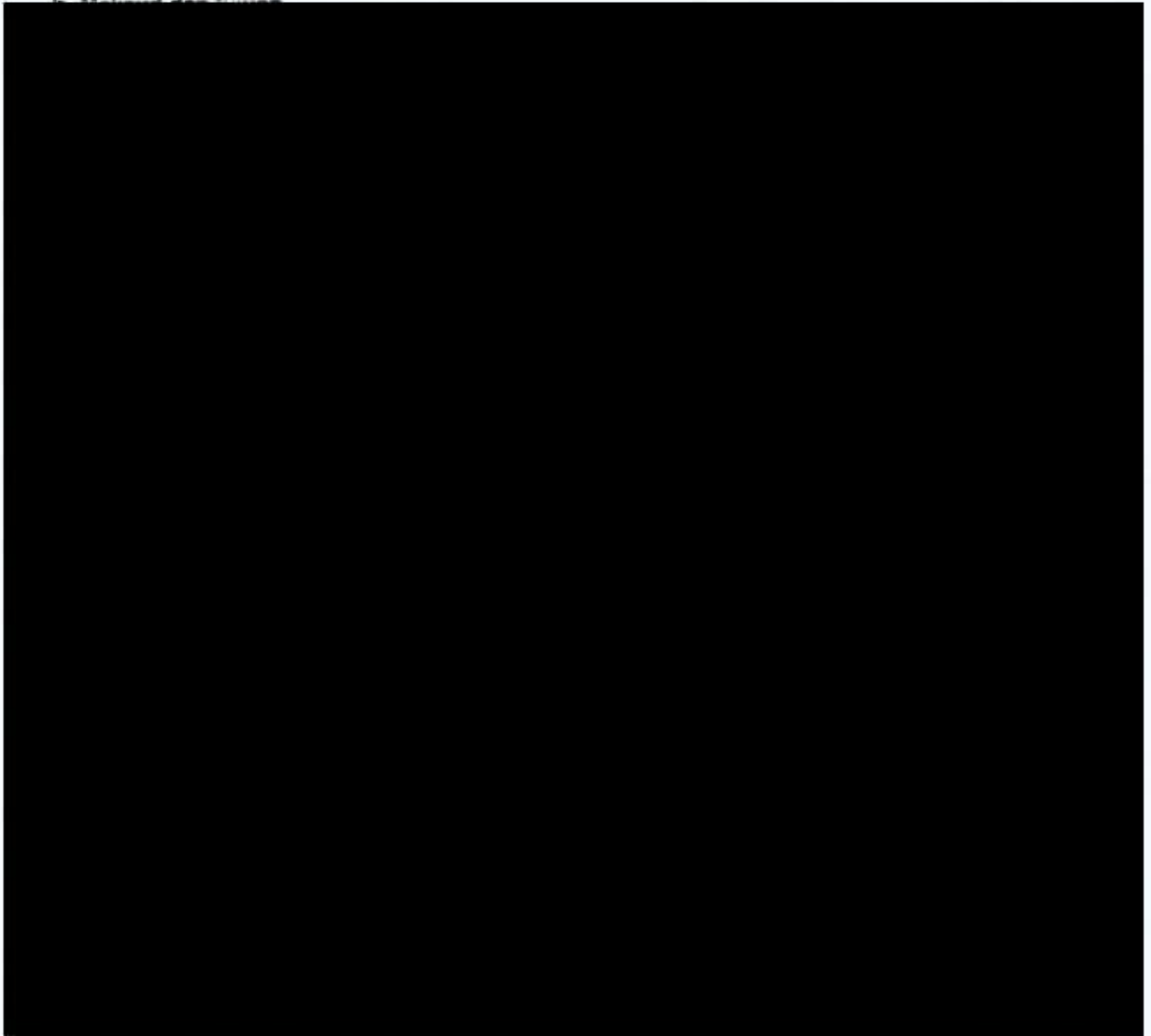
1. Umum

a. Pendirian Perusahaan

PT. Laras Sembada (Perusahaan)



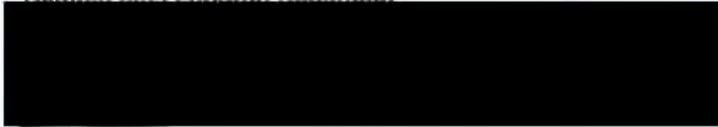
b. Maksud dan tujuan



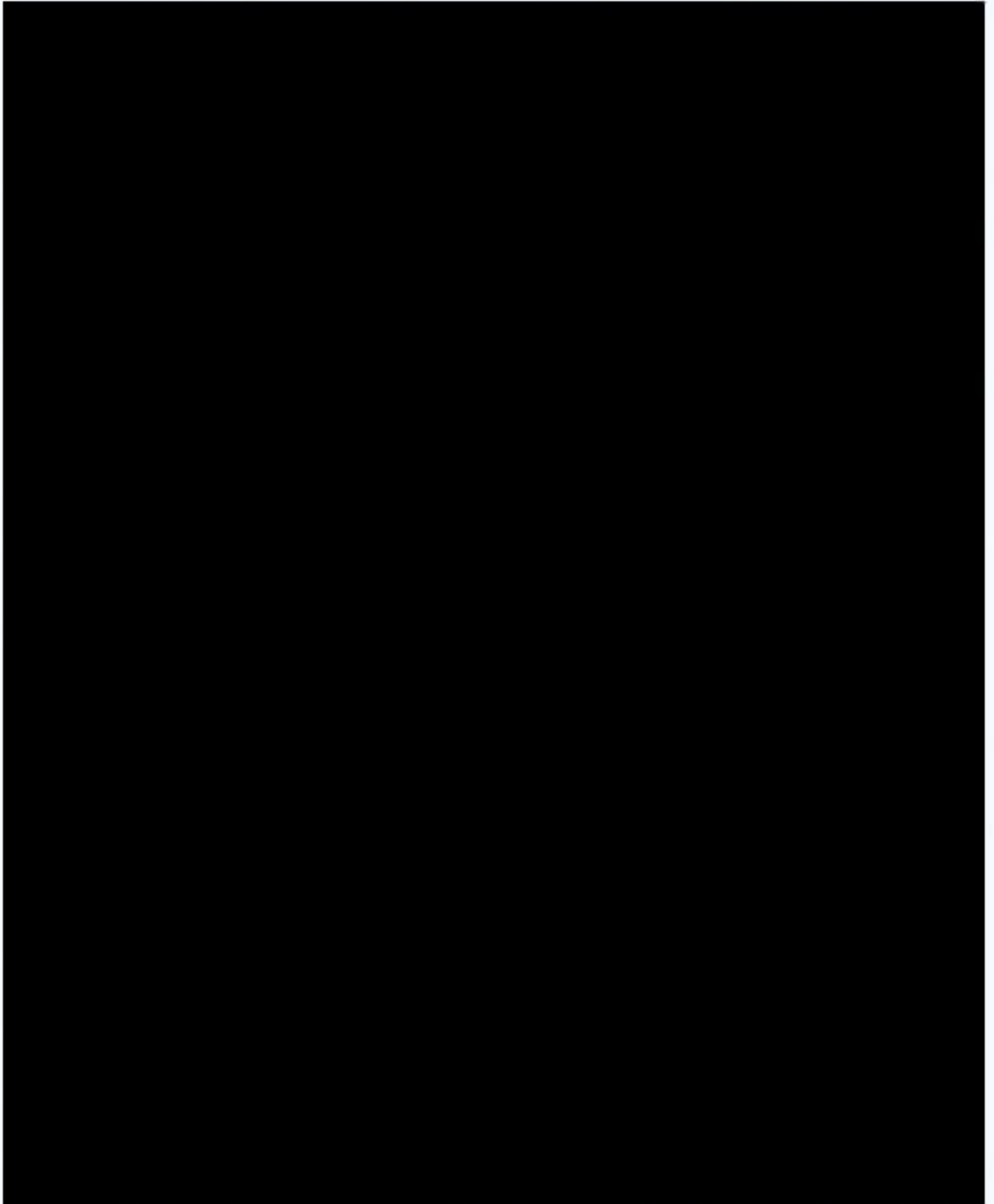
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

PT. LARAS SEMBADA

Catatan atas Laporan Keuangan



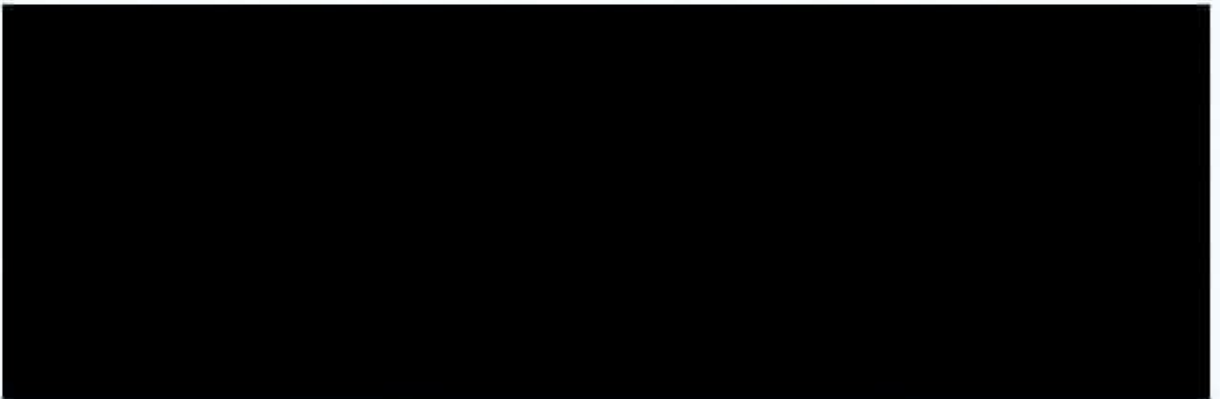
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)



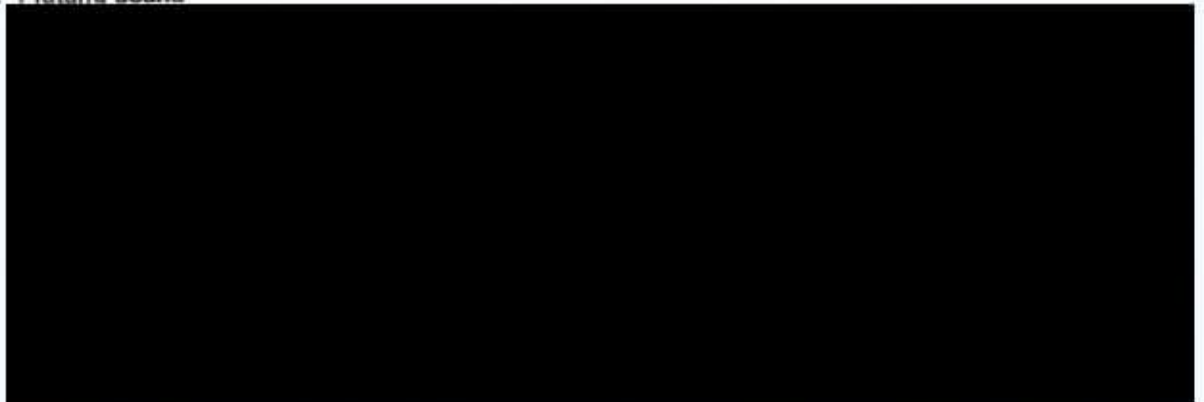
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)



3. Kas dan setara kas



4. Piutang usaha



5. Piutang lain-lain



6. Pekerjaan dalam pelaksanaan

7. Aset tetap

PT. LARAS SEMBADA
Catatan atas Laporan Keuangan



8. Utang bank



9. Utang pajak



10. Utang leasing



11. Modal saham



12. Pendapatan

2022

2021



13. Harga Pokok Pendapatan

Gaji dan tunjangan
Biaya operasinal proyek
Biaya lainnya
Harga pokok penjualan

14. Beban usaha

Beban administrasi dan umum :

Gaji dan tunjangan
Penyusutan
Perbaikan dan pemeliharaan
Pengiriman, transportation, BBM, Tol dan parkir
Pemasaran
Pajak penghasilan pasal 21
Beban pajak
Perjalanan dinas
Operasional kantor
Listrik.telepon dan Air
Perlengkapan
Jasa profesional
Pos dan meterai
Telekomunikasi
Sewa
Perjamuan
Asuransi
Sumbangan
Lain-lain

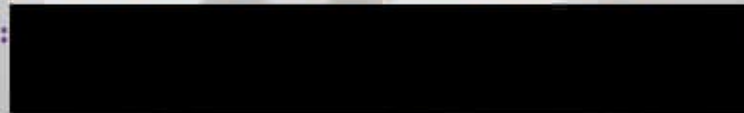
15. Pendapatan (beban) lain-lain

Pendapatan lain-lain
Bunga pinjaman
Beban lain-lain

16. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

DOKUMEN KUALIFIKASI

Nomor :



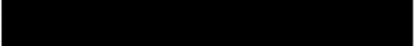
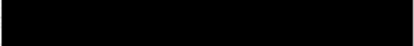
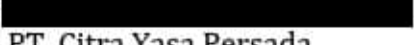
**untuk
Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi
MK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
(MYC 2025-2026)**

**Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan KALSEL I UKPBJ - PKP 2025
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun Anggaran 2025 - 2026**

CYP PT. CITRA YASA PERSADA
ENGINEERING AND MANAGEMENT CONSULTANT

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 
NIK : 
Jabatan : 
Bertindak untuk dan atas nama : PT. Citra Yasa Persada

dalam rangka Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi **MK Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)** pada Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan KALSEL I UKPBJ – PKP 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 – 2026, dengan ini menyatakan bahwa:

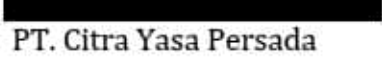
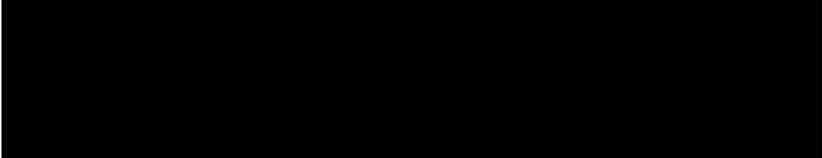
1. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

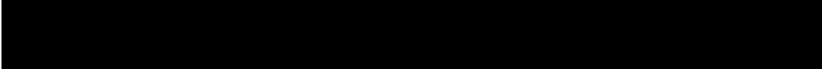
Jakarta, 

PT. CITRA YASA PERSADA


FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : 
Jabatan : 
Bertindak untuk dan atas nama : PT. Citra Yasa Persada
Alamat : 

No. Telepon : 
E-mail : 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. saya secara hukum untuk dan atas nama 

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD [bagi pegawai K/L/PD, yang sedang cuti diluar tanggungan K/L /PD ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. DATA ADMINISTRASI

1	Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi) : PT. CITRA YASA PERSADA
2	Status :
3	Alamat Kantor Pusat :
	:
	No. Telepon :
	No. Fax :
	E-Mail :
4	Alamat Kantor Cabang :
	No. Telepon :
	No. Fax :
	E-Mail :

B. IZIN USAHA

SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)	
1.	Nama Perusahaan :
2.	Nomor Induk Berusaha :
3.	Lokasi Yang Dimohon :
-	Alamat :
-	Desa/Kelurahan :
-	Kecamatan :
-	Kabupaten/Kota :
-	Provinsi :
-	Luas Lahan :
-	Rencana Kegiatan :
SURAT KETERANGAN DOMISILI	
1.	Surat Keterangan :
2.	Masa Berlaku Izin Domisili :
3.	Instansi Pemberi Izin Domisili :
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	
1	Nama Pelaku Usaha
2	Nomor NIB
3	Alamat
4	No. Telepon
5	Email
6	Tanggal Pembaharuan
7	Status Penanaman Modal
8	KBLI
9	Instansi Penerbit

SERTIFIKAT STANDAR		
1. Surat Keterangan	:	
2. Instansi Penerbit	:	

C. SERTIFIKAT BADAN USAHA

SERTIFIKAT BADAN USAHA KONSTRUKSI (SBU) RK001		
Nama Pelaku Usaha	:	
Nomor Induk Berusaha	:	
PB-UMKU	:	
Asosiasi Yang Diikuti	:	
Nama PJB	:	
Nama PJTBU	:	
Nama PJTBU 2	:	
E-mail	:	
NPWP	:	
Jenis Usaha	:	
Nomor Registrasi LPJK	:	
Ditetapkan Tanggal	:	
Masa Berlaku s.d.	:	
Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi		
Kualifikasi	:	
Kode Subkla	:	
Sifat	:	
KBLI	:	
Subklasifikasi	:	
Nama PJSKBU	:	
SERTIFIKAT BADAN USAHA KONSTRUKSI (SBU)		
Nama Pelaku Usaha	:	
Nomor Induk Berusaha	:	
PB-UMKU	:	
Asosiasi Yang Diikuti	:	
Nama PJB	:	
Nama PJTBU	:	
Nama PJTBU 2	:	
E-mail	:	
NPWP	:	
Jenis Usaha	:	
Nomor Registrasi LPJK	:	
Ditetapkan Tanggal	:	
Masa Berlaku s.d.	:	

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi	
Kualifikasi	:
Kode Subkla	:
Sifat	:
KBLI	:
Subklasifikasi	:
Nama PJSKBU	:

D. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA

1. Akta Pendirian PT. Citra Yasa Persada	
a. Nomor	:
b. Tanggal	:
c. Nama Notaris	:
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM	:
Pengesahan Akte Pendirian PT. Citra Yasa Persada	
a. Nomor	:
b. Tanggal	:
c. Nomor Notaris	:
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM	:
2. Akta Perubahan Terakhir PT. Citra Yasa Persada	
a. Nomor	:
b. Tanggal	:
c. Nomor Notaris	:
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM	:

E. PENGELOLA BADAN USAHA

1. Komisaris / Pengawas untuk Perseroan Terbatas (PT)

No	Nama	No. KTP	Jabatan Dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No	Nama	No. KTP	Jabatan Dalam Badan Usaha

F. DATA KEUANGAN**1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)**

No	Nama	No KTP	Alamat	Saham

2. Pajak

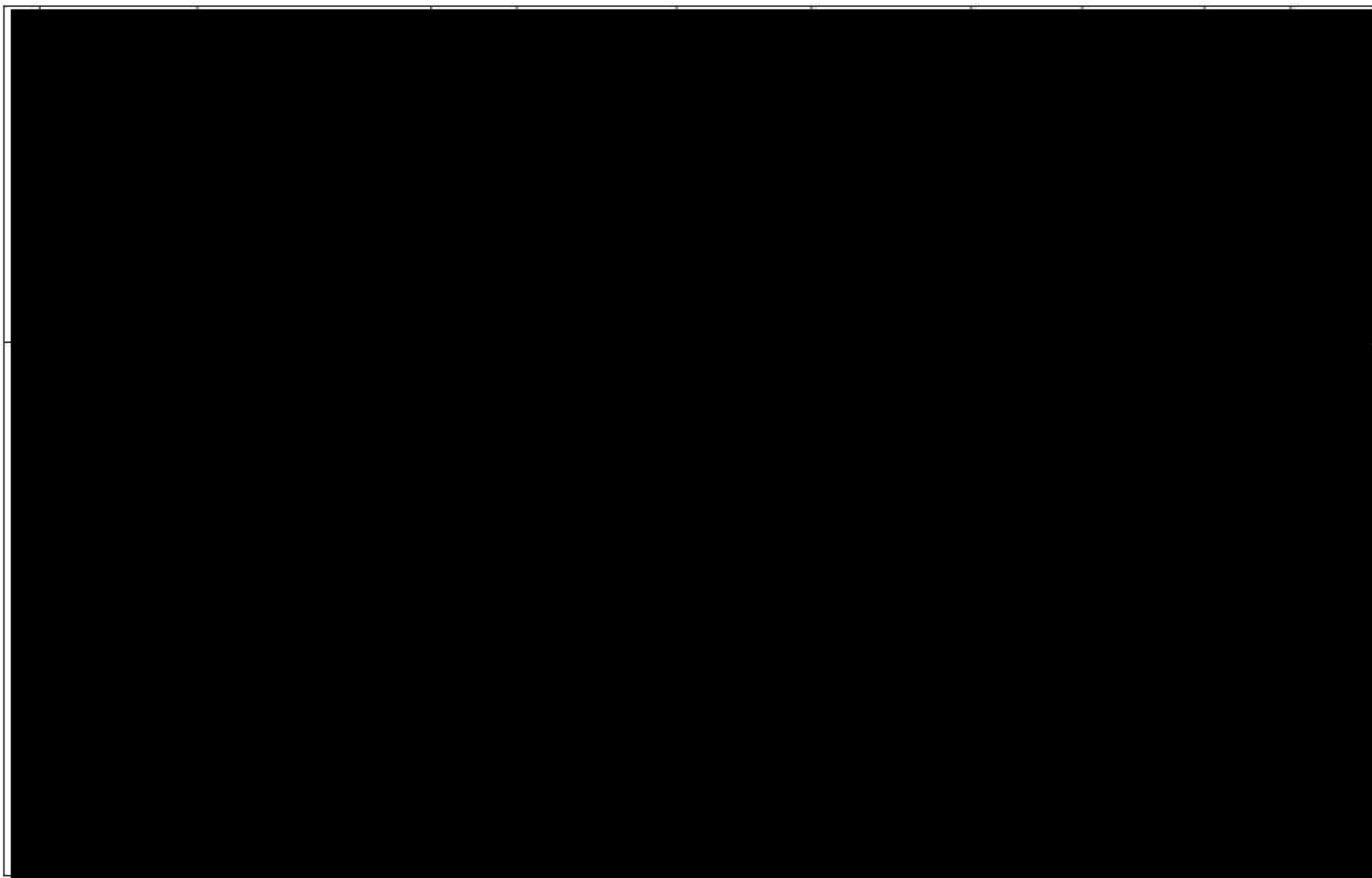
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak :	
	Surat Keterangan Terdaftar :	
	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak :	
2.	Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir Nomor/Tanggal :	
3.	Konfirmasi Status Wajib Pajak :	

G. DATA FASILITAS/PERALATAN/PERLENGKAPAN

[illegible]

H. DATA PENGALAMAN PEKERJAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DALAM KURUN WAKTU 4 TAHUN TERAKHIR

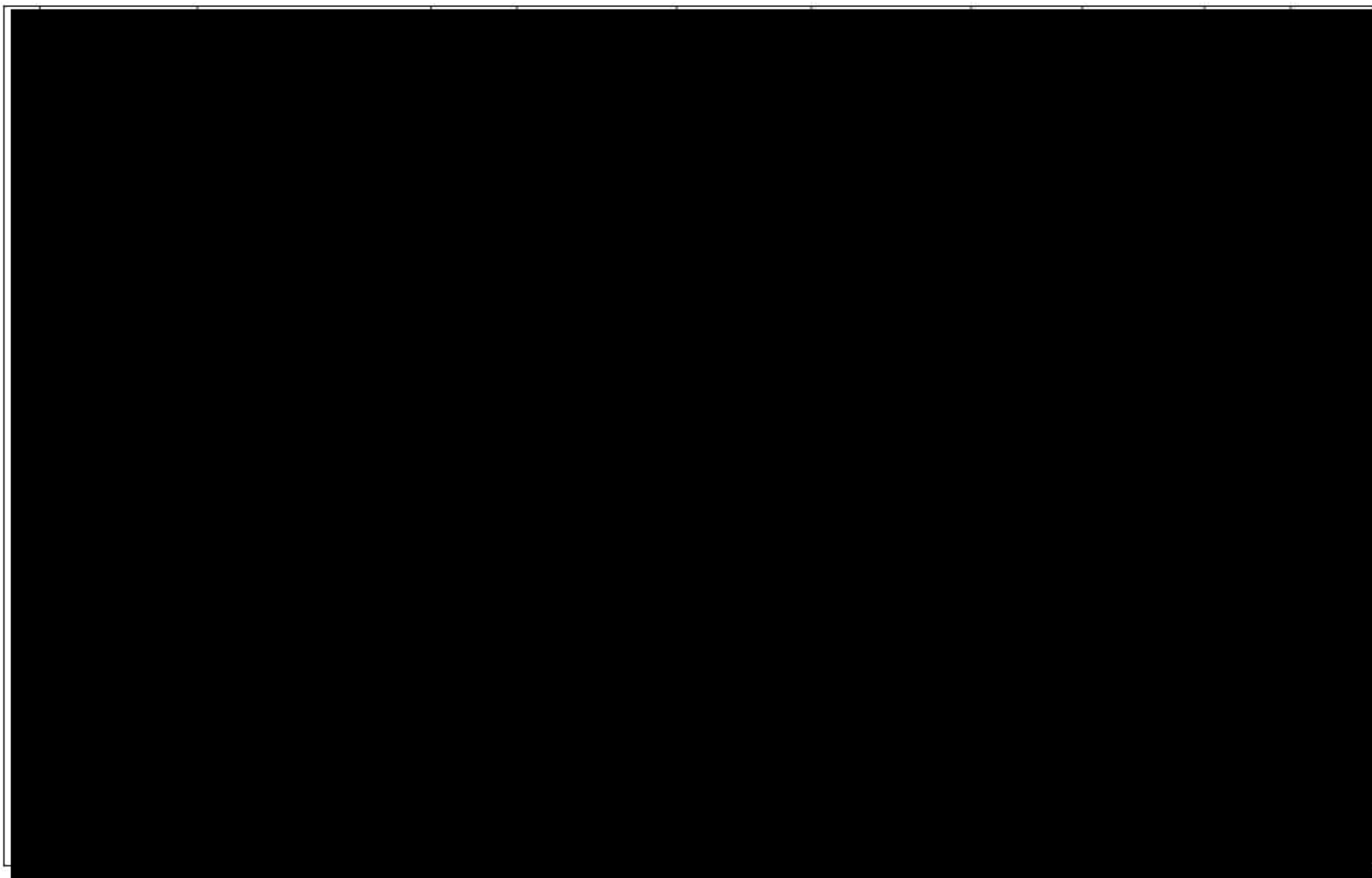
No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Status Penyedia Dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/Telepon	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima (PHO)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

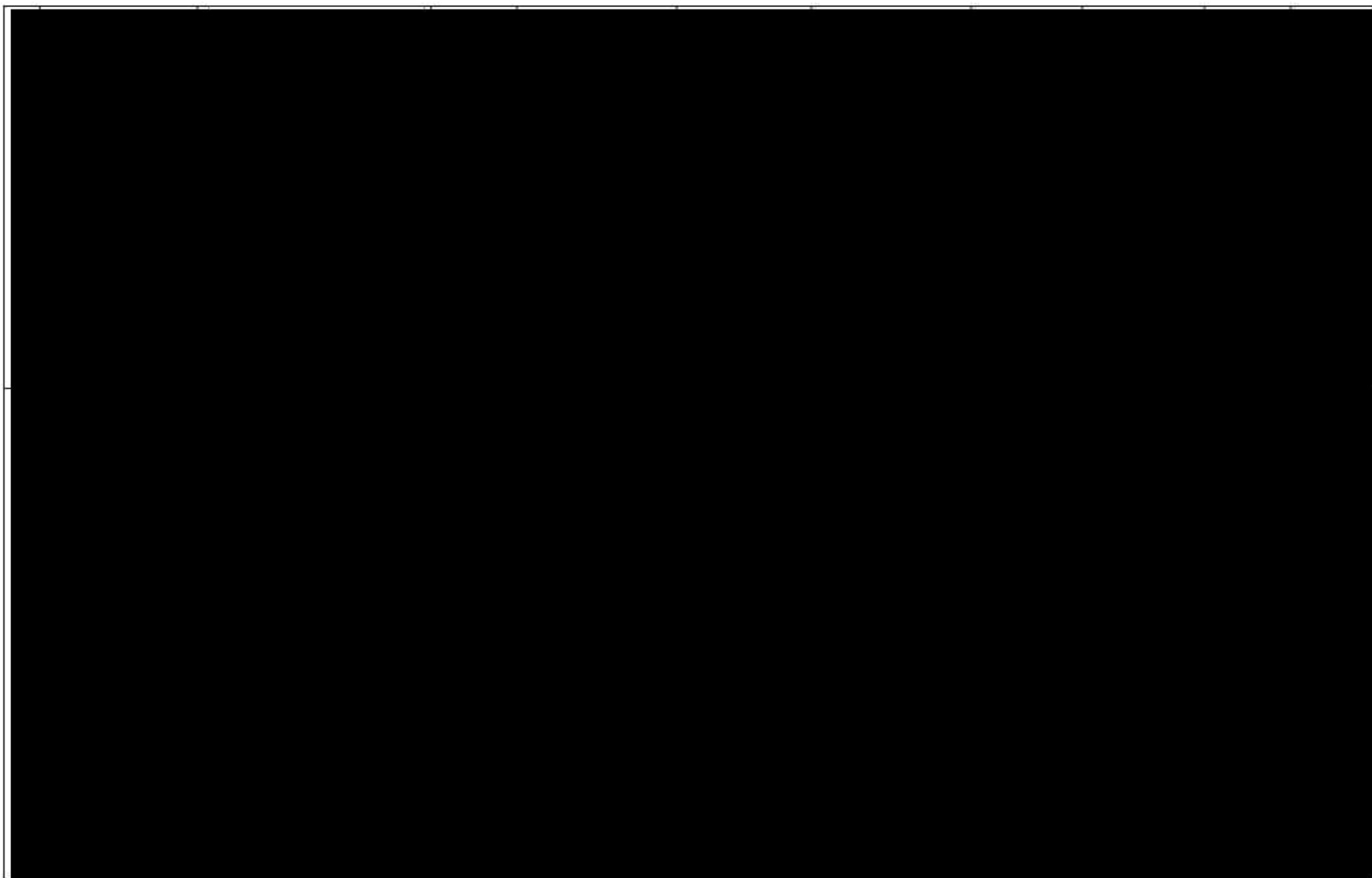






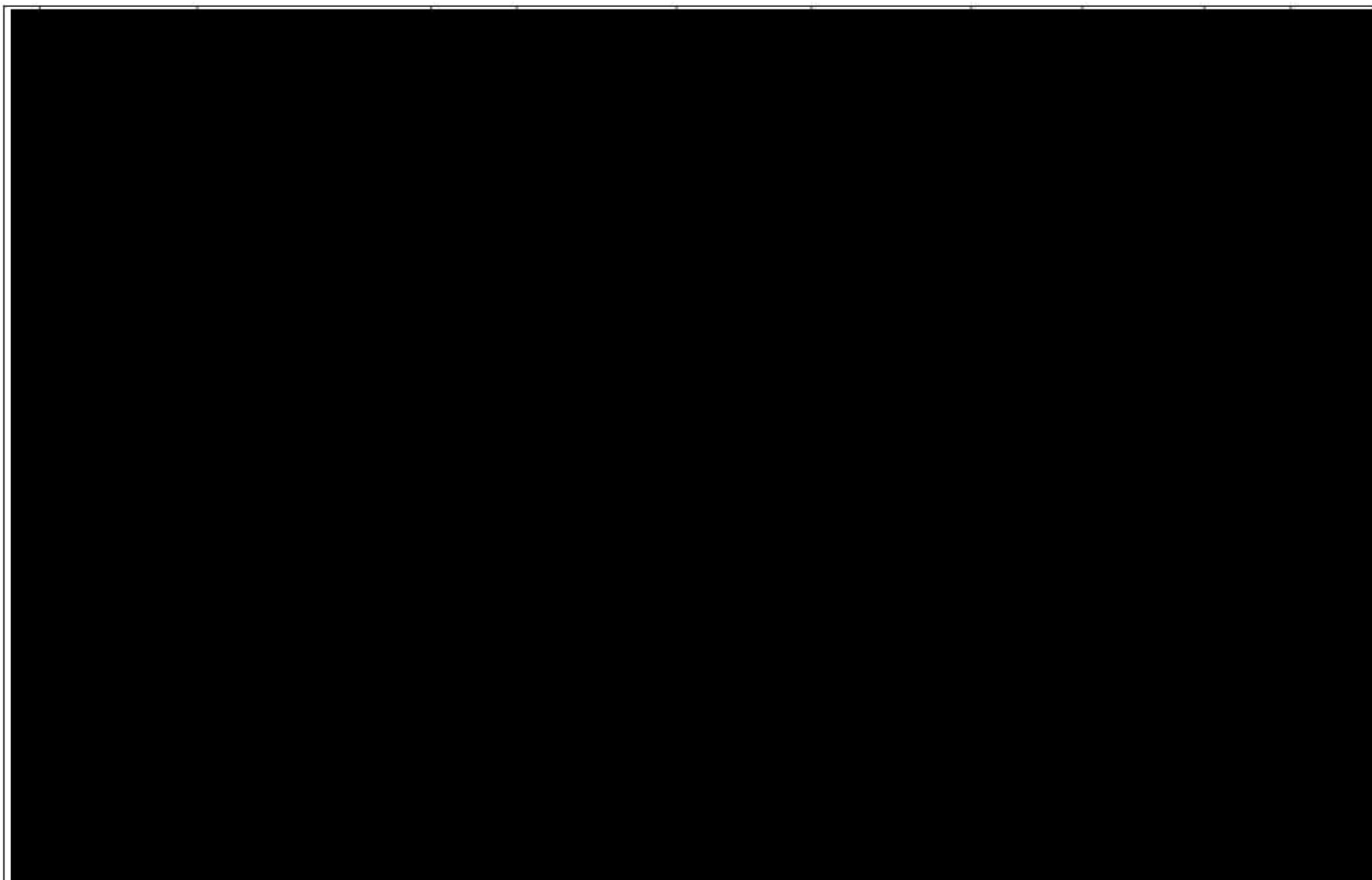


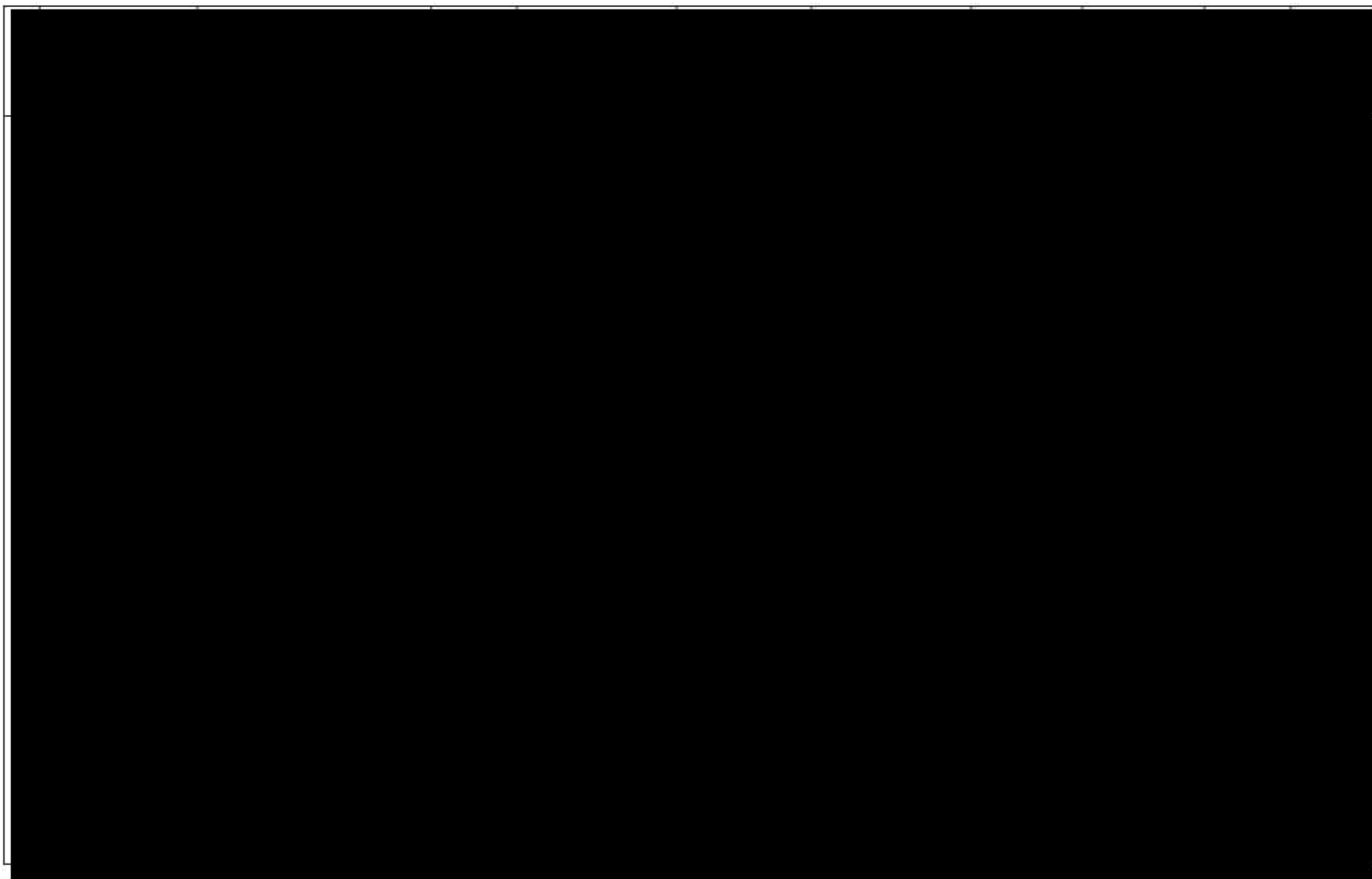


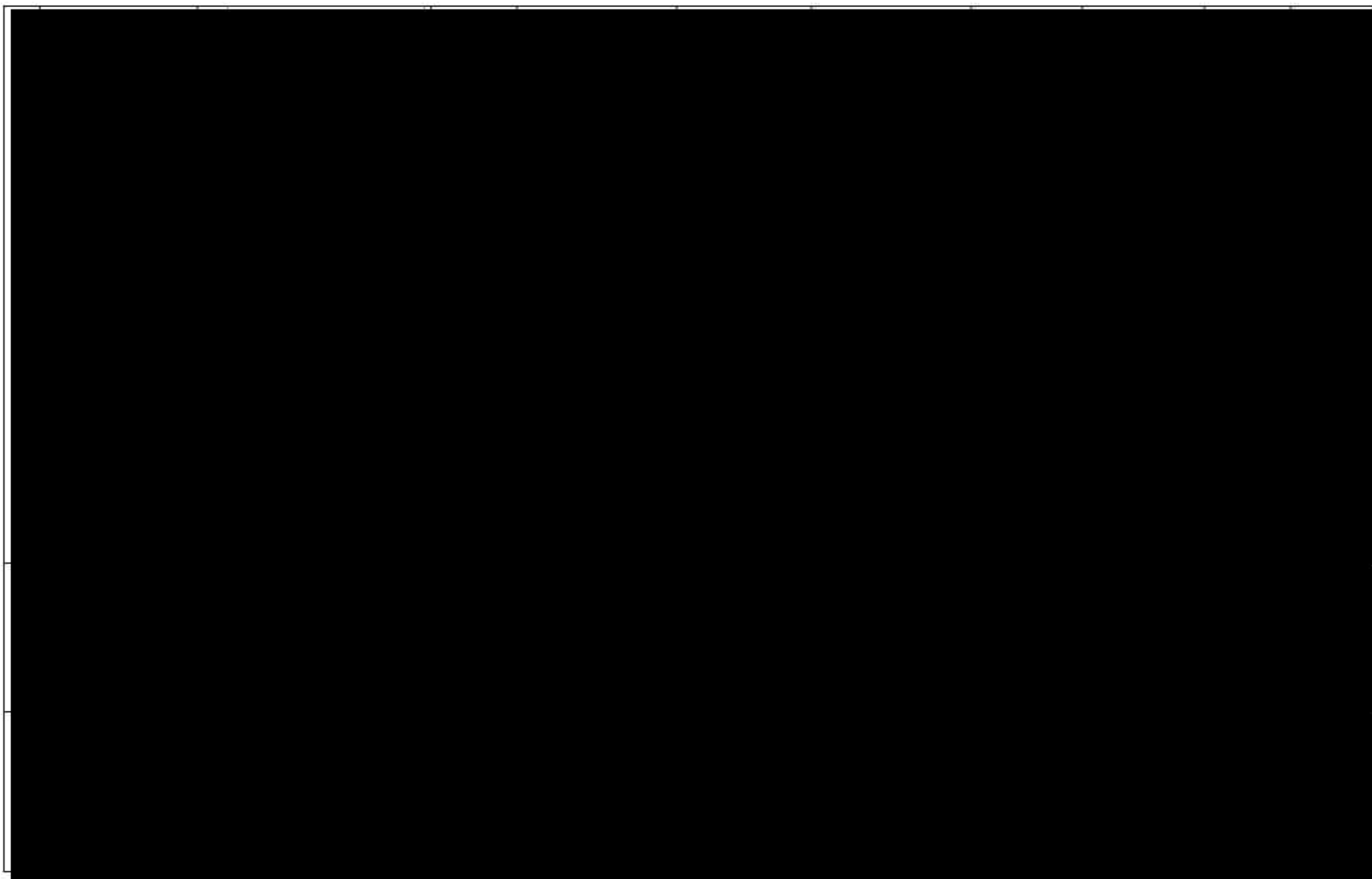








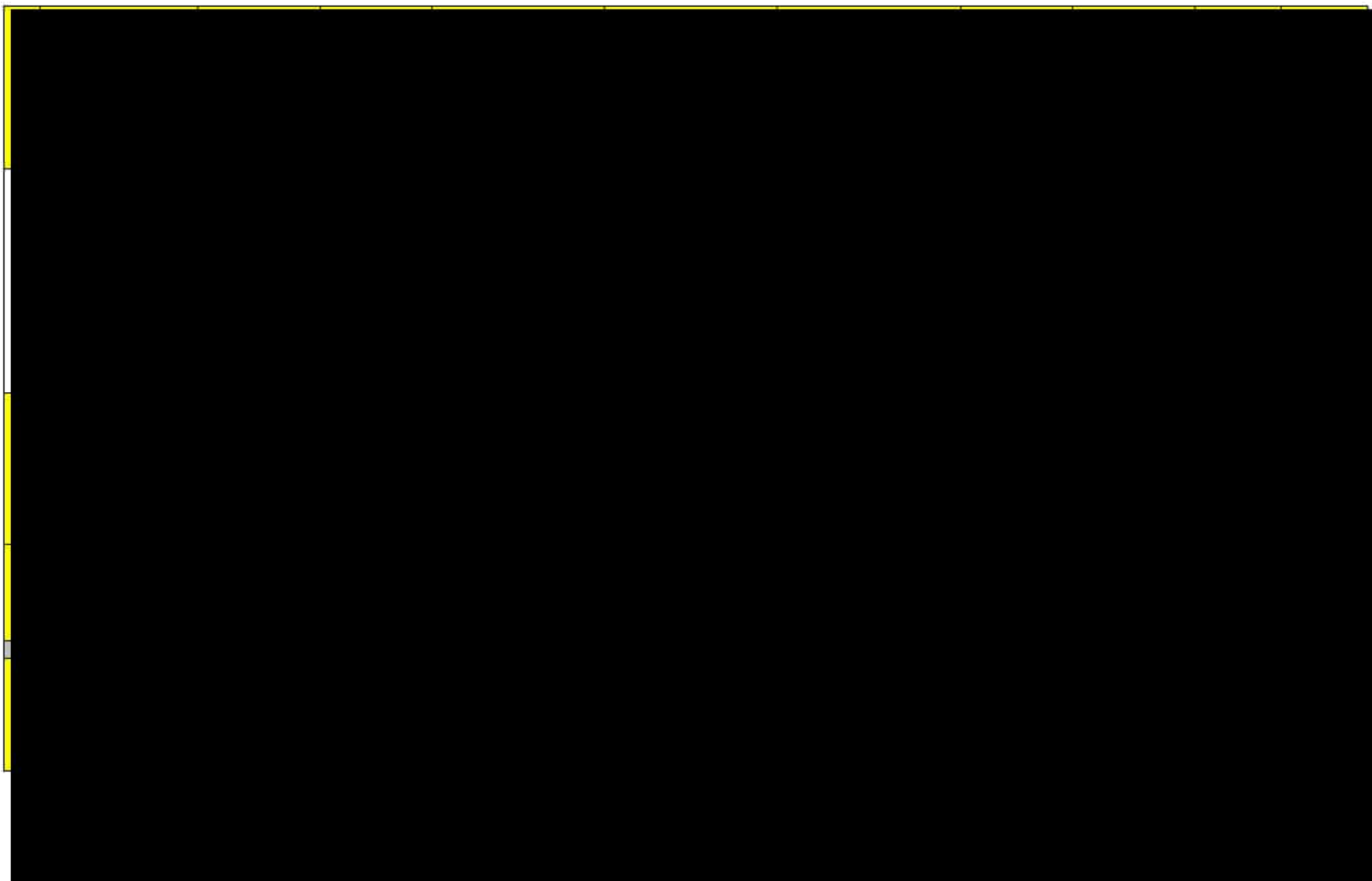




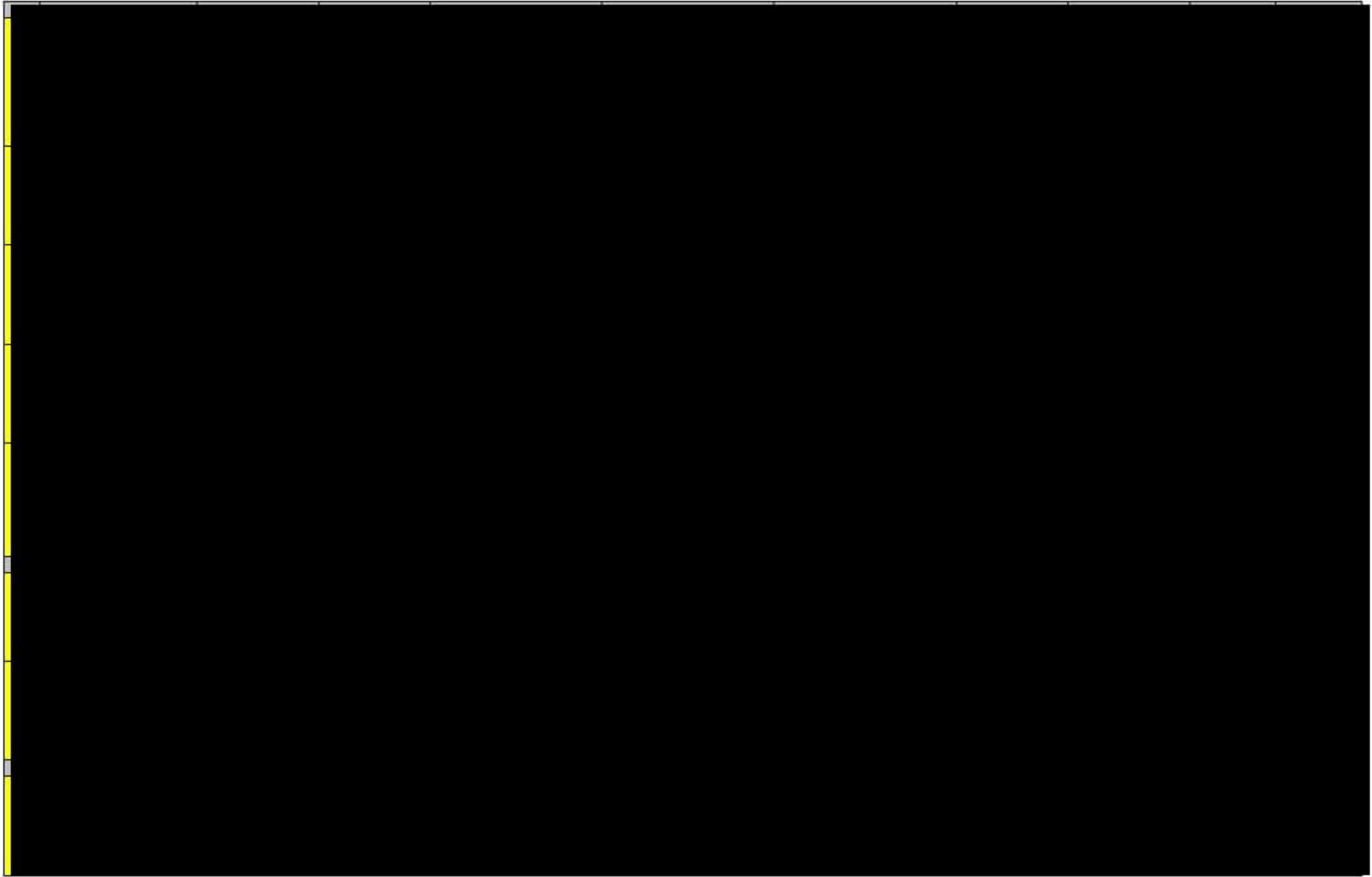
J. DATA PENGALAMAN PEKERJAAN SEJENIS DALAM KURUN WAKTU 10 TAHUN TERAKHIR

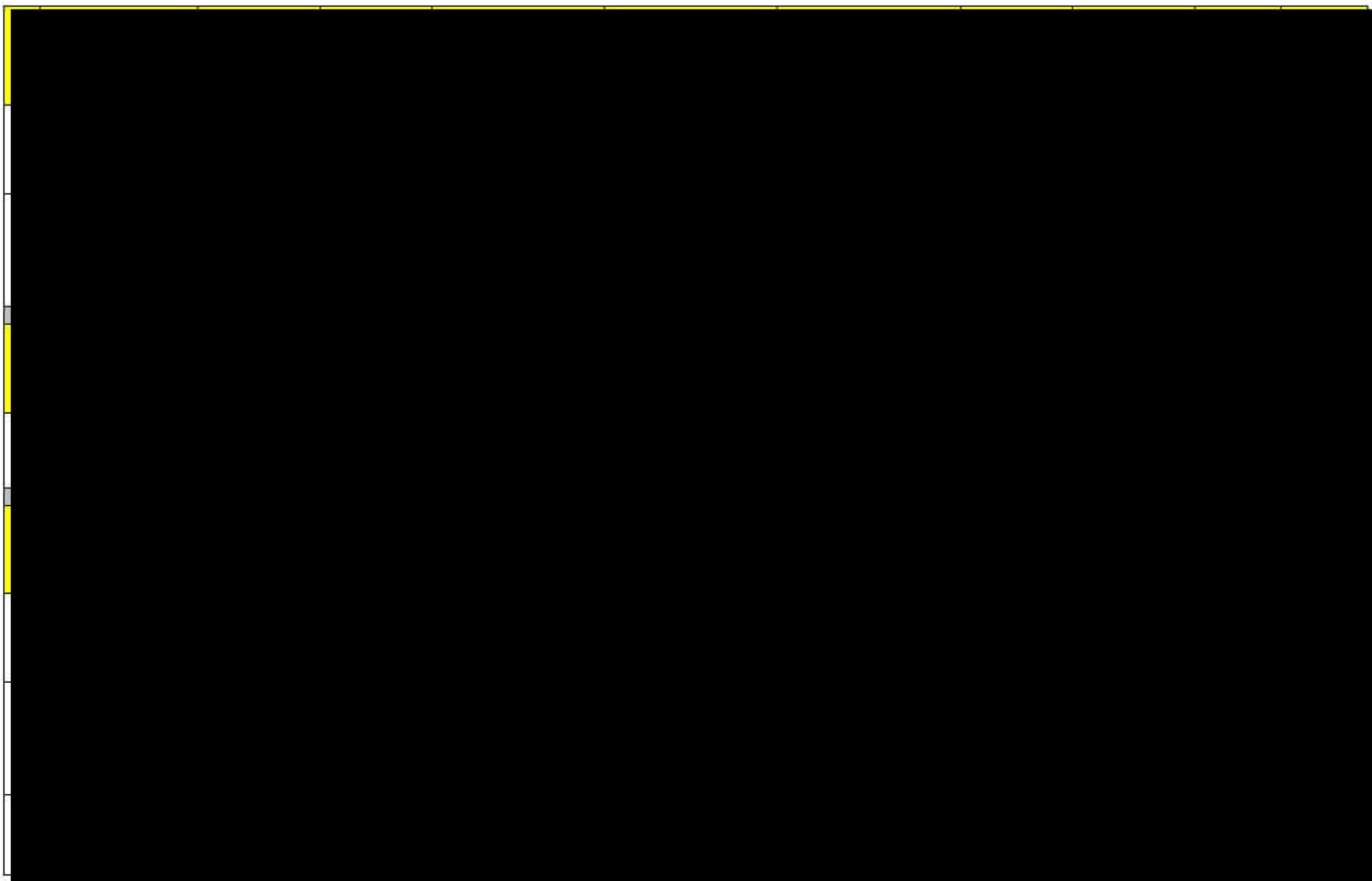
: Pekerjaan sejenis berdasarkan Subklasifikasi KL403 atau RK001

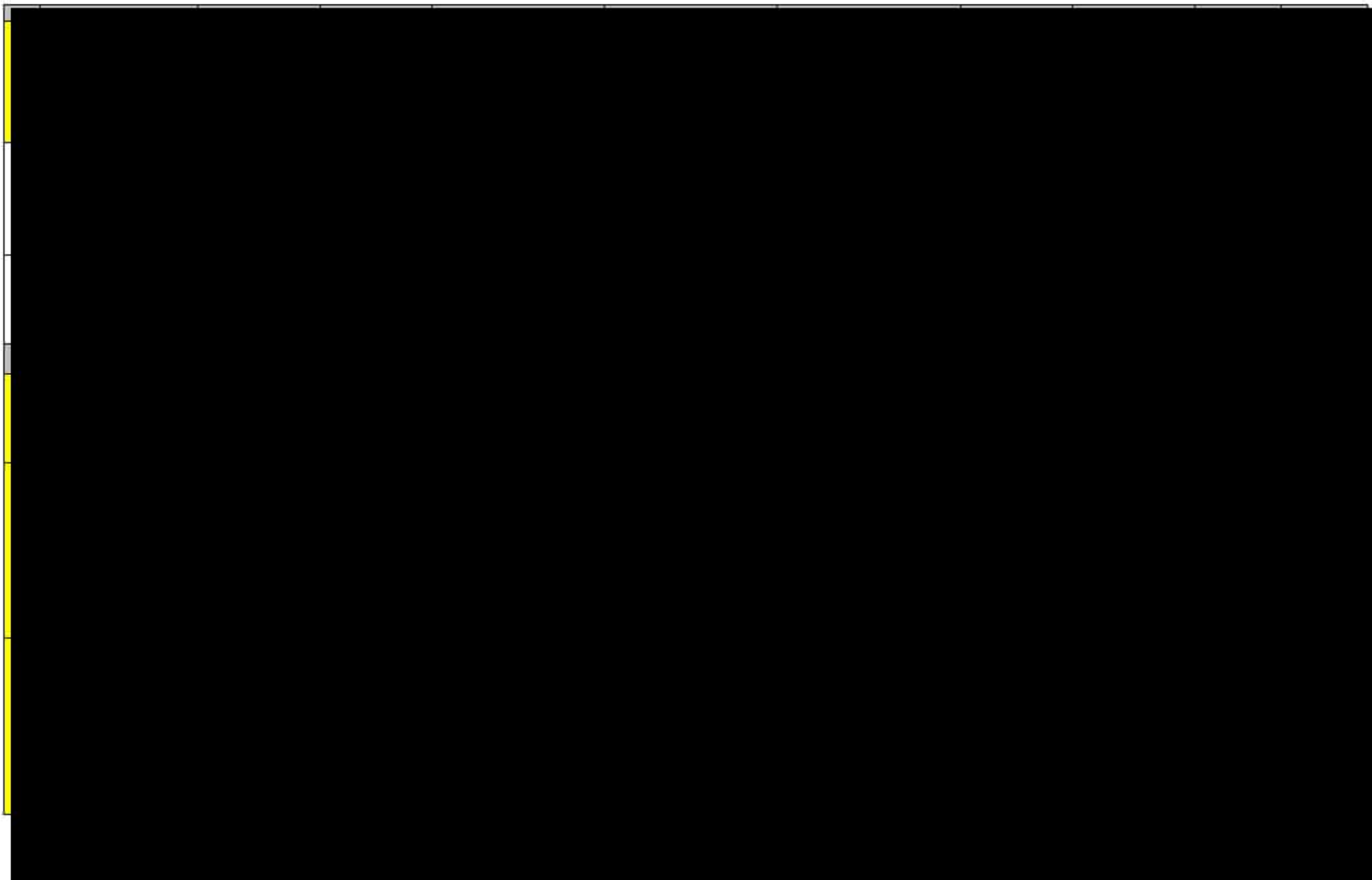
[illegible]

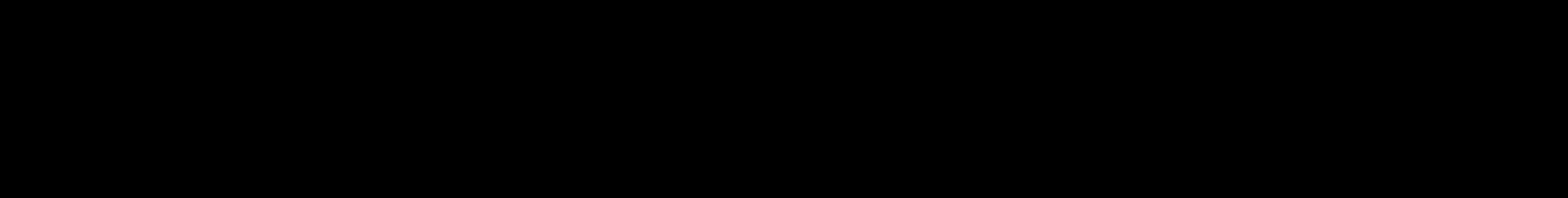












K. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN (*Wajib Diisi Untuk Menghitung SKN*)

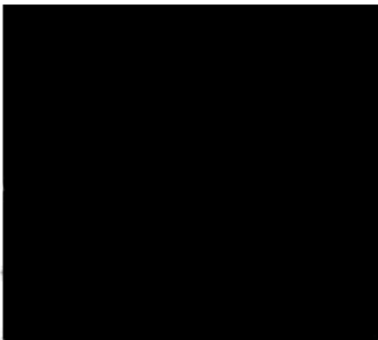
No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Total Prograss	
				Nama	Alamat/Telepon	No/Tanggal	Nilai	Status Tgl.	Total Progress
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 24 Oktober 2025

PT. Citra Yasa Persada





PT. CITRA YASA PERSADA

PT. CITRA YASA PERSADA
ENGINEERING AND MANAGEMENT CONSULTANT



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan :
Bertindak untuk dan
atas nama :
Alamat :

No. Telepon :
E-mail :

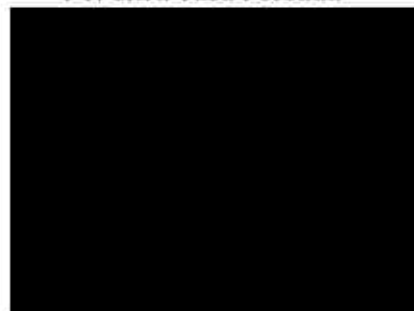
dengan ini **MENYATAKAN** bahwa :

1. Perusahaan Dan Manajemennya Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Dan Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan;
2. Semua Pengurus Badan Usaha Tidak Sedang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
3. Yang Bertindak Untuk Dan Atas Nama Badan Usaha Tidak Sedang Dalam Menjalani Sanksi Daftar Hitam;
4. Keikutsertaan Kami Tidak Menimbulkan Pertentangan Kepentingan Para Pihak Yang Terkait Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung;
5. Yang Bertindak Untuk Dan Atas Nama Badan Usaha Tidak Sedang Dalam Menjalani Sanksi Pidana;
6. Pimpinan dan Pengurus Badan Usaha Bukan Sebagai Pegawai Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah Atau Sebagai Pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah Yang Sedang Mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara;
7. Data Kualifikasi Yang Diisikan Adalah Benar,
8. Apabila Alokasi Dalam Dokumen Anggaran (DIPA TA.2025) Yang Disahkan Tidak Tersedia Dan/Atau Tidak Mencukupi, Maka Pengadaan Barang / Jasa Dapat Dibatalkan Dan Penyedia Barang /Jasa Tidak akan Menuntut Ganti Rugi Dalam Bentuk Apapun.

Dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Jakarta, 24 Oktober 2025
PT. Citra Yasa Persada





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: [REDACTED]**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha
2. Alamat Kantor

PT CITRA YASA PERSADA

- No. Telepon
- Email
3. Status Penanaman Modal
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: [REDACTED]

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**

[REDACTED]
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: [REDACTED]

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: [REDACTED]

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	NIB dan Izin Usaha
2				NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2				Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3				Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
4				Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum	Untuk persiapan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

					terverifikasi	
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
5	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI		Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
6	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya		Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
7	72102	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa		Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
8	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI		Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
9	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI		Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI

PB-UMKU:



Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT CITRA YASA PERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : |
| 3. Alamat Kantor | : |
| 4. Status Penanaman Modal | : |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 71102 - Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI Indonesia (KBLI) | : |
| 6. Lokasi Usaha | : |
| 7. Perpanjangan atas izin | : |
| - Nama Izin | : |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit | : |

Telah Memenuhi Persyaratan:

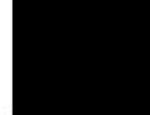
1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal:

Perubahan ke-2, tanggal:

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal:

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





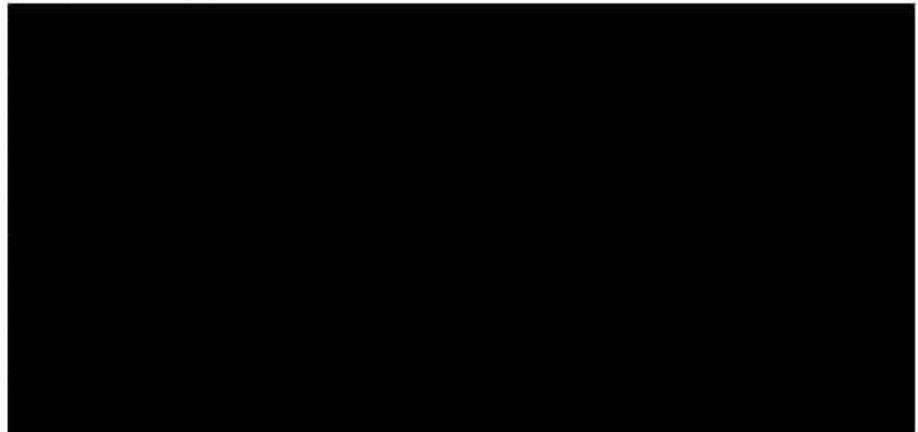
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN

PB-UMKU: [REDACTED]

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. CITRA YASA PERSADA:

Asosiasi yang diikuti :
Nama PJBU :
Nama PJTBU :
Nama PJTBU 2 :
E-mail :
NPWP :
Jenis Usaha :
Nomor Registrasi LPJK :
Ditetapkan tanggal :
Masa Berlaku s.d. :



Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Menengah	RK001	Umum	71102	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian	
Pelaksana sertifikasi						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSIr-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

No.KTP

Jabatan

Alamat

Menerangkan bahwa:

Nama

No.KTP

Jabatan

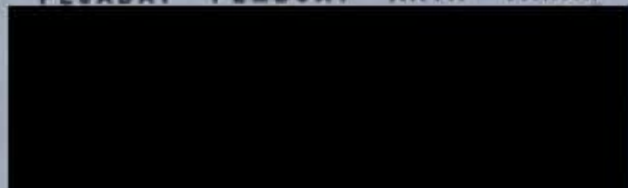
Alamat

Dengan ini menerangkan bahwa **PT. Citra Yasa Persada** benar berdomisili di

Demikian surat keterangan domisili ini kami buat sebagaimana mestinya dan dengan sebenarnya untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

★ KANTOR — NOTARIS

★ PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH



Gedung

Turunan/Salinan

Akta:

PENDIRIAN PERSEPOAN TERBATAS

PT. " CITRA YASA PERSADA "

Tgl.



No.



PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. " CITRA YASA PERSADA "

Nomor: [REDACTED]

[REDACTED]
Pada hari ini, [REDACTED]
[REDACTED]

Menghadap kepada saya, [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, —
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: —

1. [REDACTED]

2. [REDACTED]

3. [REDACTED]

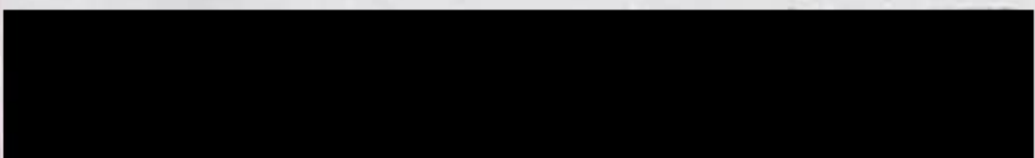
4. [REDACTED]

Para penghadap yang telah saya, notaris, kenal, —

dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan
hal-hal yang disebutkan diatas.

DEMikian AKTA INI :

Diselesaikan dan dilangsungkan di Bandung,
pada hari dan tanggal tersebut di atas,



Setelah akta ini saya, notaris, bacakan kepada para
penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga
para penghadap, para saksi dan saya, notaris,
menandatangani.

Dibuat dengan memakai enam renvoi, yaitu satu tambahan
dan lima coretan serta gantiannya.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [REDACTED]
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT CITRA YASA PERSADA

Menimbang : a

- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT CITRA YASA PERSADA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT CITRA YASA PERSADA - [REDACTED]

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal [REDACTED]

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DICETAK PADA TANGGAL [REDACTED]
DAFTAR PERSEROAN [REDACTED]



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT CITRA YASA PERSADA

- 1. Modal Dasar : [redacted]
- 2. Modal Ditempatkan : [redacted]
- 3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
[redacted]				

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal [redacted]

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DICETAK PADA TANGGAL [redacted]
DAFTAR PERSEROAN [redacted]



NOTARIS

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

= S A L I N A N =

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. CITRA YASA PERSADA

NOMOR :

TANGGAL :

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. CITRA YASA PERSADA

Nomor: [REDACTED]

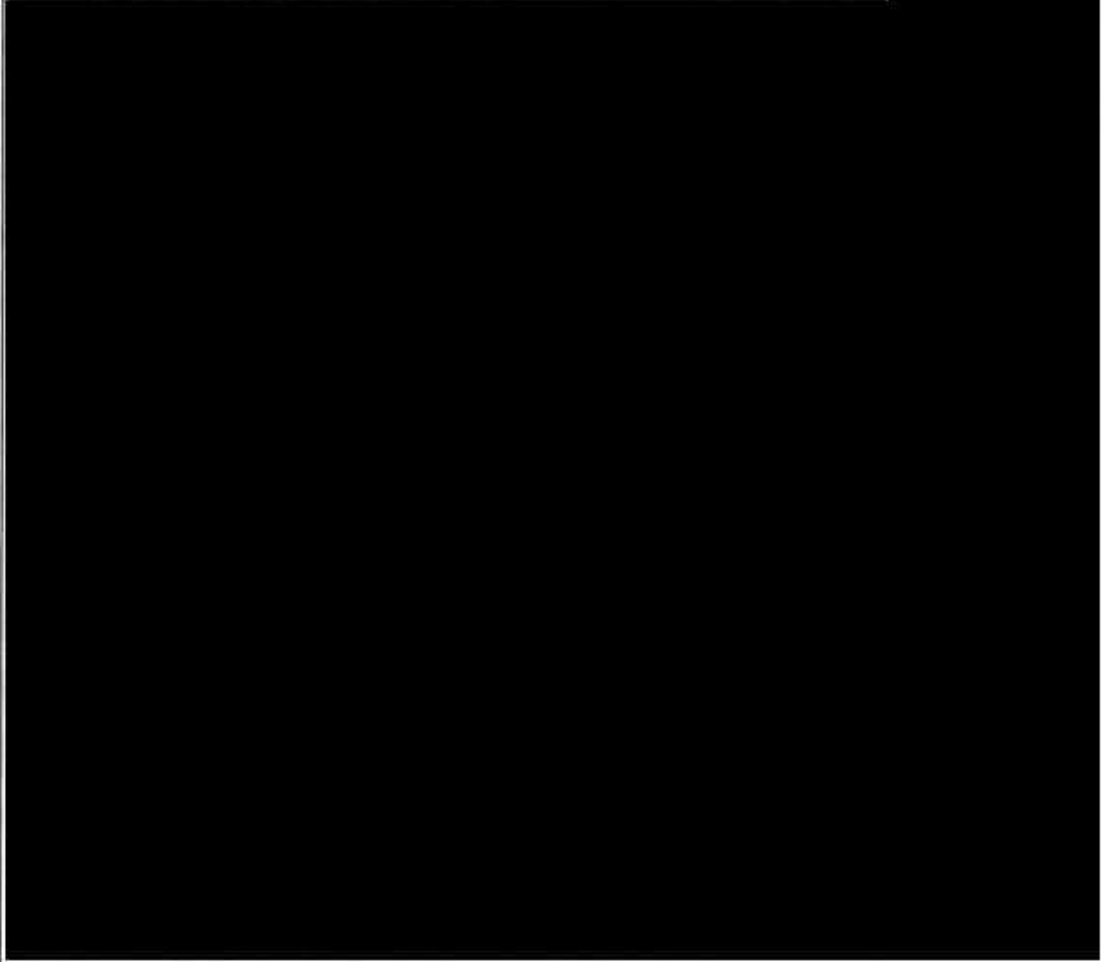
-Pada [REDACTED]

[REDACTED] dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama--
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini dan--
telah dikenal oleh saya, Notaris: -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan Kuasa yang tercantum dalam Notulen Rapat---
Umum Pemegang Saham Biasa perseroan terbatas **PT. CITRA-**
YASA PERSADA, dibawah tangan bermaterai cukup,-----

[REDACTED] yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini,----
sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas--
nama Rapat Umum Pemegang Saham perseroan terbatas **PT.--**
CITRA YASA PERSADA.-----

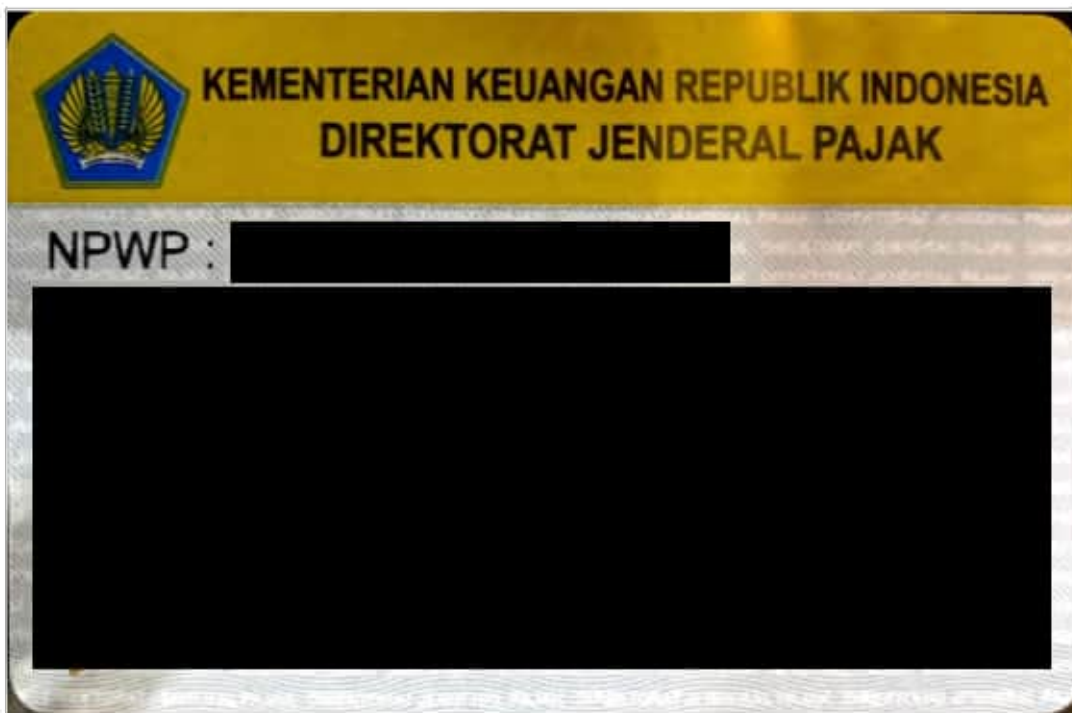
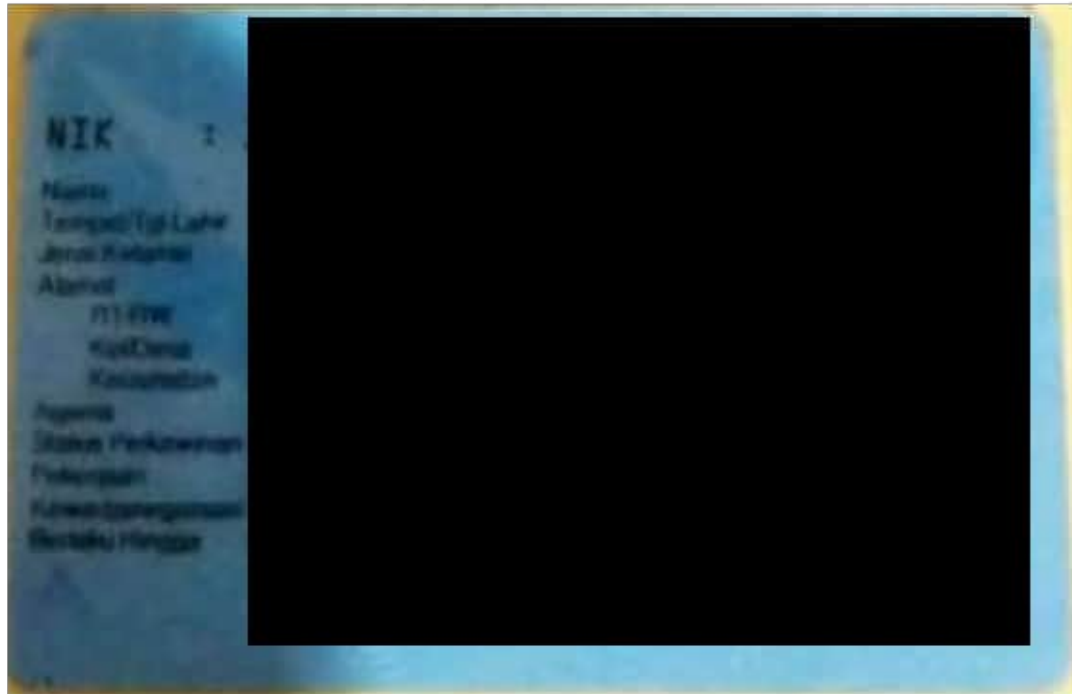
pada awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan 



- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -
(para) penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini diparaf
tiap halaman serta ditandatangani oleh (para) -----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
 - Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
 - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-
 - Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----
- 

KTP & NPWP PENGURUS PT. CITRA YASA PERSADA

KOMISARIS



DIREKTUR UTAMA

NIK	:	
Nama	:	
Tempat/Tgl Lahir	:	
Jenis kelamin	:	
Alamat	:	
RT/RW	:	
Kel/Desa	:	
Kecamatan	:	
Agama	:	
Status Perkawinan	:	
Pekerjaan	:	
Kewarganegaraan	:	
Bertaku Hingga	:	

	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
NPWP	:	

DIREKTUR

NIK :
Nama
Tempat/Tgl Lahir
Jenis Kelamin
Alamat
RT/RW
Kel/Desa
Kecamatan
Agama
Status Perkawinan
Pekerjaan
Kewarganegaraan
Berlaku Hingga

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

[REDACTED]

[REDACTED]

KPP PRATAMA [REDACTED]



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH [REDACTED]
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA [REDACTED]

SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Nomor : [REDACTED]

Tanggal : [REDACTED]

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa Wajib

Pajak:

Nama : CITRA YASA PERSADA

NPWP : [REDACTED]

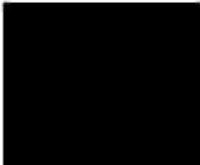
Alamat : [REDACTED]

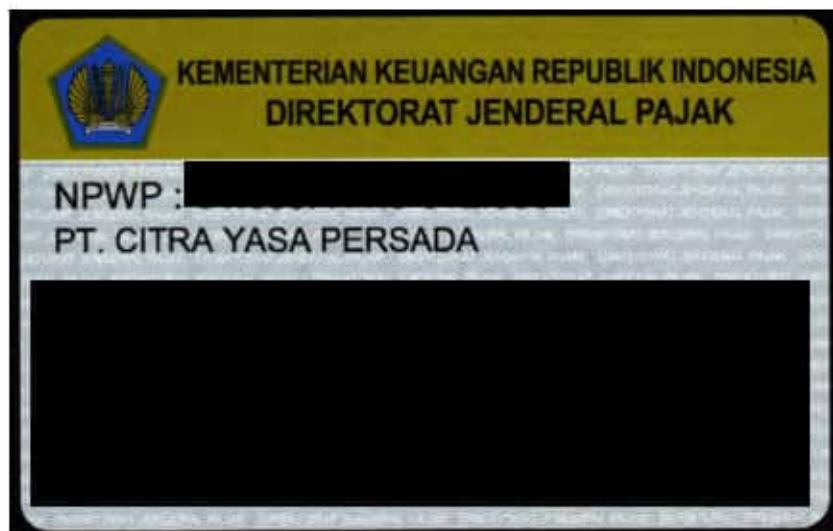
Status : Valid

Keterangan ini dibuat dalam rangka [REDACTED]

[REDACTED]

Demikian disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.







KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH

KPP PRATAMA

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : [REDACTED]

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. CITRA YASA PERSADA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : [REDACTED]
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : [REDACTED]
4. Kategori : [REDACTED]

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak [REDACTED] dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Jakarta Barat, [REDACTED]

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

TTD



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KPP PRATAMA [REDACTED]

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor: [REDACTED]

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. CITRA YASA PERSADA
2. NPWP : [REDACTED]

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak [REDACTED] dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

[REDACTED]
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,
[REDACTED]

[e-Form] Bukti Penerimaan Elektronik

1 pesan

Direktorat Jenderal Pajak <no-reply@pajak.go.id>

Kepada: [REDACTED]

Penyampaian SPT Elektronik	
◆ Direktorat Jenderal Pajak	
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.	

Nama : CITRA YASA PERSADA	
NPWP :	[REDACTED]
NITKU :	[REDACTED]
Tahun Pajak :	[REDACTED]
Masa Pajak :	[REDACTED]
Jenis SPT :	[REDACTED]
Pembetulan :	[REDACTED]
Status SPT :	[REDACTED]
Nominal :	[REDACTED]
Tanggal Penyampaian :	[REDACTED]
Nomor Tanda Terima Elektronik :	[REDACTED]
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.	

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebaran, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4

INDUK

BUKA

FORMULIR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN:- SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK
- BERI TANDA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECKBOX) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

SPT PEMBETULAN KE

0

IDENTITAS

N P W P

☐ Bentuk Usaha Tetap (BUT)

NAMA WAJIB PAJAK

CITRA YASA PERSADA

JENIS USAHA

KLU 71101

NO TELP

#2

NO FAKS

PERIODE PEMBUKUAN

s.d.

☐ Dalam 1 Tahun Berjalan

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NAMA AKUNTAN PUBLIK

NPWP AKUNTAN PUBLIK

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK

NAMA KONSULTAN PAJAK

NPWP KONSULTAN PAJAK

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

RUPIAH *)

(1)

(2)

(3)

A. PENGHASILAN KENA PAJAK

B. PPh TERUTANG

C. KREDIT PAJAK

D. PPh KIRANGAN / LEMIH BAYAR

Formulir 1771

Halaman 2

		RUPIAH *)
(1)	(2)	(3)
E. ANGGARAN PPh PAJAL 25 TAHUN BERJALAN		
F. PPh FINAL DAN PENGHILIAN RESERVA GEDER PAJAL		
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA		
H. LAMPIRAN		

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bentahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: [REDACTED]**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha
2. Alamat Kantor

PT CITRA YASA PERSADA

- No. Telepon
- Email
3. Status Penanaman Modal
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tang [REDACTED]
Perubahan ke-26, tanggal: [REDACTED]

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**

[REDACTED]
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: [REDACTED]

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: [REDACTED]

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	74120	Aktivitas Desain Interior	[REDACTED]	NIB dan Izin Usaha
2	71206	Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)		NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2				Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3				Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
4	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	[REDACTED]	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum	Untuk persiapan kegiatan usaha

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

					terverifikasi	
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
5	7			Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
6	6			Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
7	7			Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
8	7			Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
9	7			Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI

PB-UMKU: [REDACTED]

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT CITRA YASA PERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : [REDACTED] |
| 3. Alamat Kantor | : [REDACTED] |
| 4. Status Penanaman Modal | : [REDACTED] |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 71102 - Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : [REDACTED] |
| 7. Perpanjangan atas izin | : [REDACTED] |
| - Nama Izin | : [REDACTED] |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit | : [REDACTED] |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: [REDACTED]

Perubahan ke-2, tanggal: [REDACTED]

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: [REDACTED]

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN

PB-UMKU: [REDACTED]

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. CITRA YASA PERSADA:

Asosiasi yang diikuti :

Nama PJBU :

Nama PJTBU :

Nama PJTBU 2 :

E-mail :

NPWP :

Jenis Usaha :

Nomor Registrasi LPJK :

Ditetapkan tanggal :

Masa Berlaku s.d. :

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Menengah	RK001	Umum	71102	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian	
Pelaksana sertifikasi : Lembaga Sertifikasi INKINDO						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : [REDACTED]**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Alamat Kantor

: PT CITRA YASA PERSADA

4. Status Penanaman Modal
5. No. Telepon
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
7. Lokasi Usaha

8. Status

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: [REDACTED]

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: [REDACTED]

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

SERTIFIKAT STANDAR : [REDACTED]

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan, Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.			

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.







KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP [REDACTED]
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA [REDACTED]

SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Nomor : [REDACTED]

Tanggal : [REDACTED]

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa Wajib

Pajak:

Nama : CITRA YASA PERSADA

NPWP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Status : Valid

Keterangan ini dibuat dalam rangka [REDACTED]

Demikian disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

